

PERENCANAAN BERBASIS KINERJA

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

**Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastuktur Prioritas Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Surabaya dan Jakarta, 16 Februari 2023

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D
Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 21 Januari 1965
Golongan : IVD
Alamat Rumah : Komplek Bappenas, Jl. Pertiwi II No.18 Blok A105, RT 03/RW01, Kedaung, Sawangan, Depok-16516 HP: 085-880-596-992
Alamat Kantor : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta-10310
Tel.: 021-3193-4195 Fax: 021-3193-4195
E-mail: sumedi@bappenas.go.id dan sumediam@gmail.com

PENDIDIKAN

1. *Using Evidence for Smart Policy Design and Implementation (Government Think Thank)*. Harvard Kennedy School Executive Education, Boston, Amerika Serikat. 12-17 Nov 2017
2. *Leadership in Succession and Talent Management*. Melbourne Business School - Mt Eliza Executive Education, Australia. 27 Okt – 1 Nov 2016
3. Postdoctoral. Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006
4. S3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar. 2004.
5. S2. Master of Arts, Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar. 1999.
6. Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept. 1994-Mar. 1995.
7. S1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 1984-Juli 1989.

PEKERJAAN

1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Pripriitas Nasional, Juli 2022-sekarang
2. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Sept 2020-Jul 2022
3. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Jan 2019-Sep 2020
4. Direktur Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas. Sep 2016-Jan 2019
5. Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah, Bappenas. Januari 2006-September 2016
6. Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas. Mei 2004-Januari 2006
7. Kepala Bagian, Biro Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas. Des. 2000-Mei 2004
8. Kepala Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan, Bappenas. Mei 1999 –Desember 2000
9. Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan, Bappenas. Maret 1994 –Januari 1997
10. Staf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, Bappenas 1991-Maret 1994

Outline Presentasi



Pendahuluan:
Visi Indonesia 2045

1



Transformasi dan Akselerasi
Pembangunan

2



Perencanaan Berbasis Kinerja dan
Kerangka Logika Perencanaan

3



Sinergi Perencanaan dan
Penggangan

4



Penutup
Kerjasama dan Kolaborasi Pentahelix

5



1

PENDAHULUAN

Indonesia Emas 2045 dan *Benchmarking*



Visi Indonesia 2045: ... Transformasi dan Akselerasi Pembangunan...

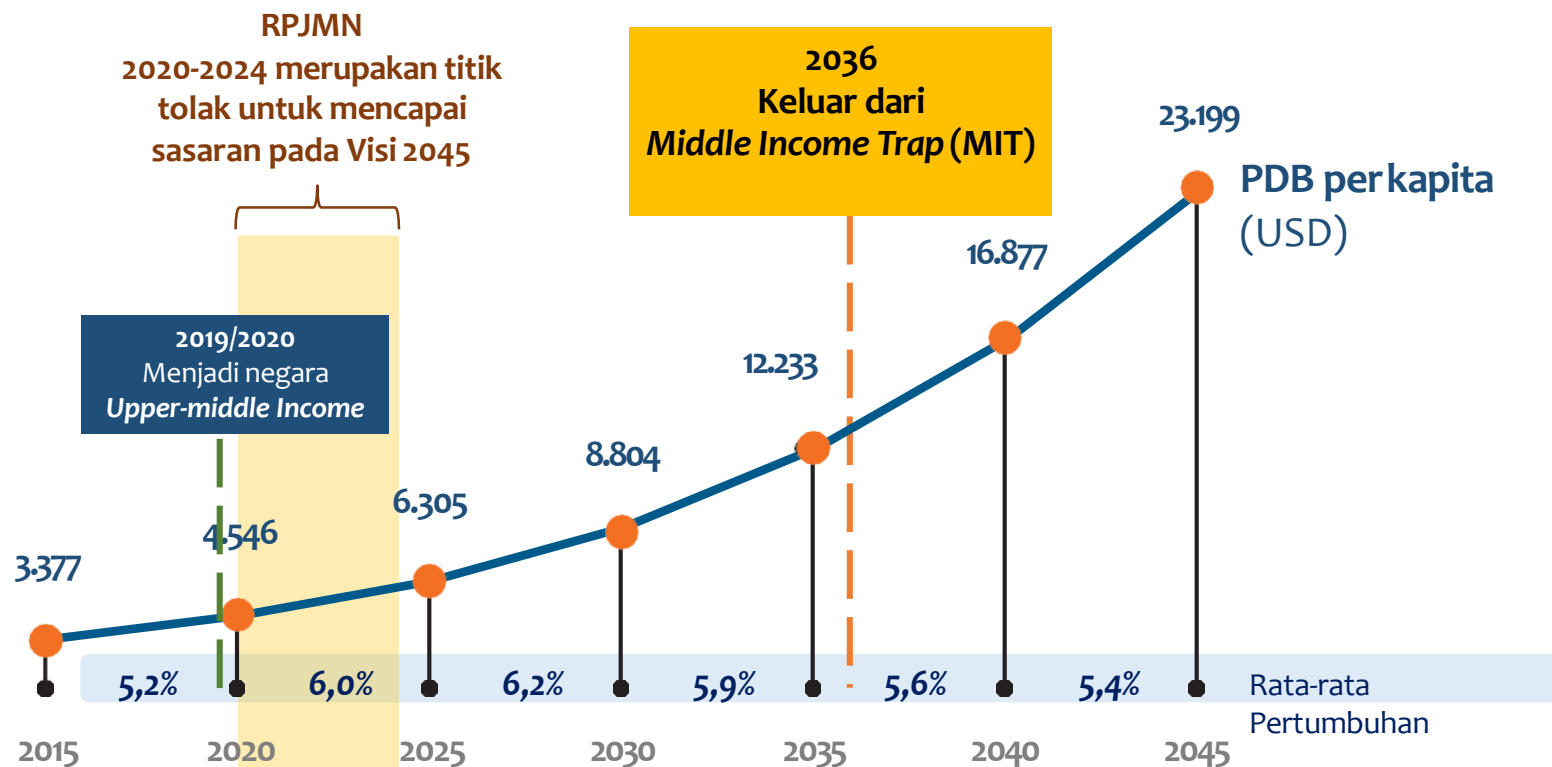
Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019

Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

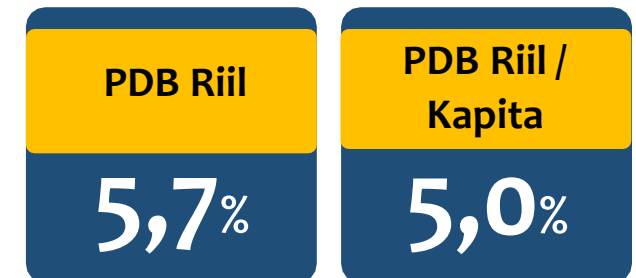
Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja.

Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar, jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif.

INDONESIA 2045 Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur



Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:



Tahun 2045:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Visi Indonesia 2045: Pengembangan Wilayah

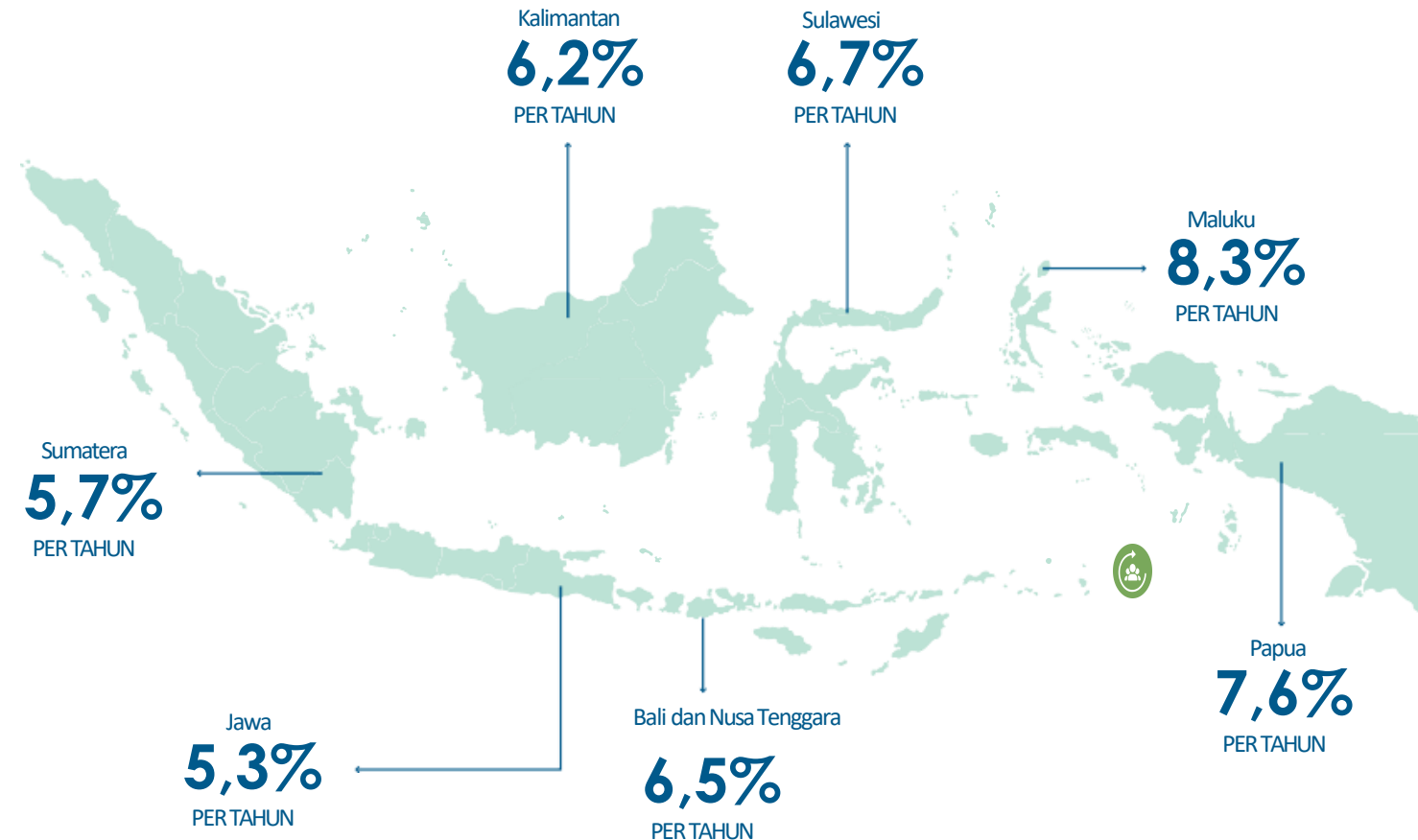
Pemerataan pembangunan daerah dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih tinggi dan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa.



	1983	2013	2015	2045
Jawa	53,8%	57,1%	58,3%	51,8%
Luar Jawa	46,2%	42,9%	41,7%	48,2%
KBI	82,5%	80,1%	80,5%	74,9%
KTI	17,5%	19,9%	19,5%	25,1%

Arah Pengembangan Daerah

Papua	Basis Pangan Nasional dan Sektor Ekonomi Berbasis SDA
Bali, Nusa Tenggara & Maluku	Basis Wisata Internasional dan Perikanan Nasional
Sulawesi	Basis Industri Pangan dan Gerbang KTI
Kalimantan	Basis Industri Pengolahan dan Lumbung Energi Nasional
Jawa	Basis Industri, Perdagangan dan Jasa
Sumatera	Basis Industri Baru dan Gerbang Kawasan Asia



Penataan Ruang Publik di Jepang

... Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman...



Pelayanan Dasar Pendidikan di Jepang

... Mandiri, Tanggung Jawab dan Tangguh...

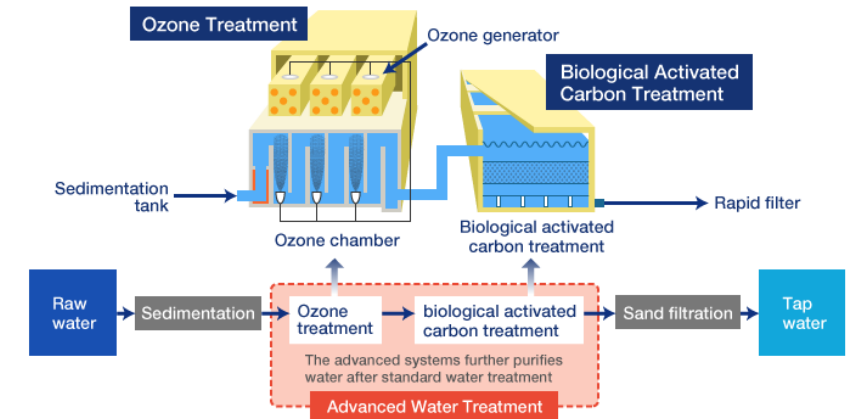


Pelayanan Dasar Air Bersih di Jepang

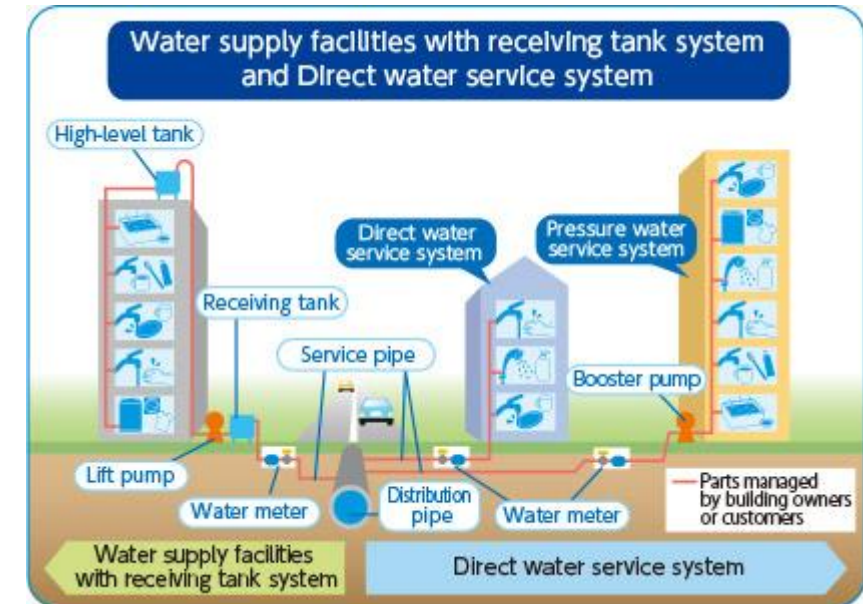
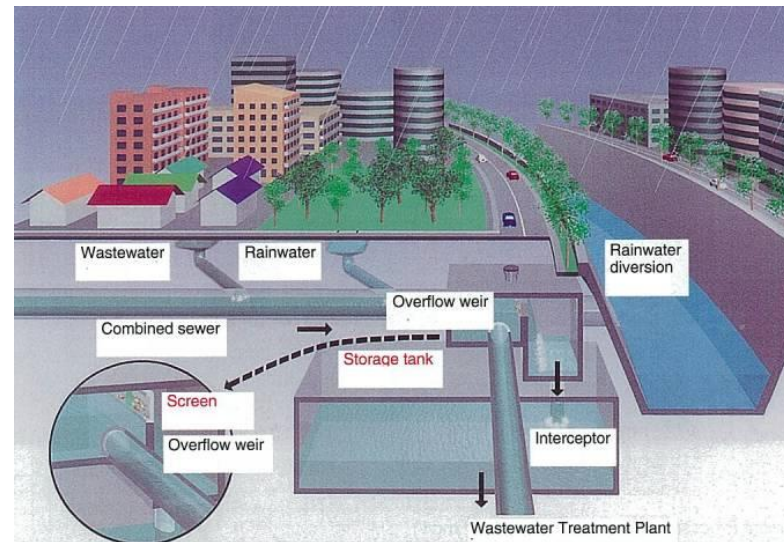
... Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan...



Tokyo Waterworks Advanced Treatment System



nippon.com



Pelayanan Dasar Persampahan di Jepang

... Bersih, Aman, Tertata, Sirkular dan Berkelanjutan...



新しい資源とごみの分け方

新しい資源とごみの分け方

『不燃ごみ』から『可燃ごみ』に変わる品目

◆プラスチック類

- チューブ類
- ペットボトル類
- プラスチック類
- プラスチック類

◆ゴム・皮革

- ゴム靴
- ゴムホース
- ゴム手袋
- 革靴
- かばん
- その他

◆紙類

- 紙類
- 紙類
- 紙類
- 紙類

◆その他

- その他
- その他
- その他
- その他

不燃ごみ

燃焼

資源

水曜日

燃焼

資源

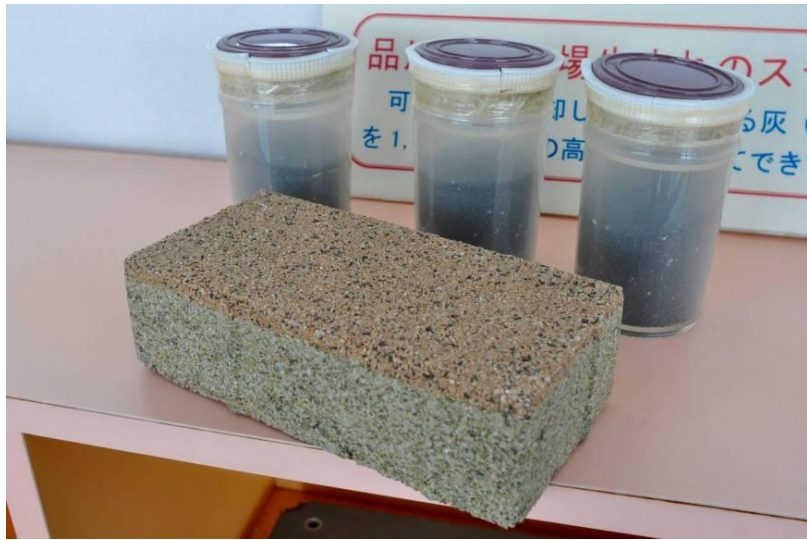
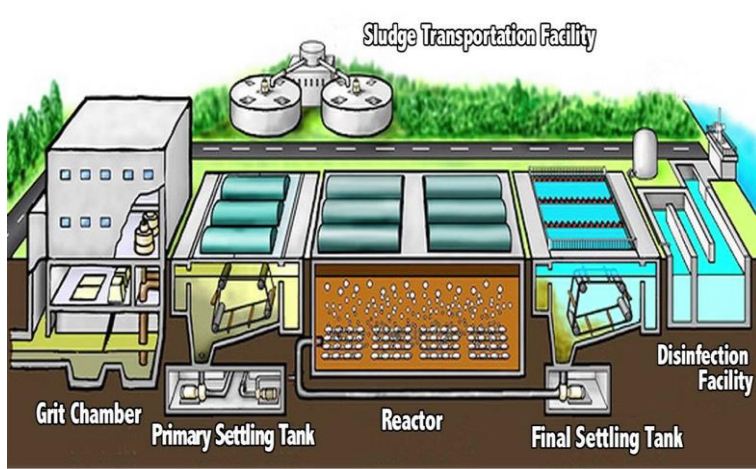
水曜日

燃焼

資源

水曜日

Facilities in Wastewater Treatment Plant



Penataan Pusat Perdagangan di Jepang ... Bersih, Aman, Tertata, Interaktif dan Nyaman...



Pengembangan Seni dan Budaya di Jepang

... Atraktif, Partisipatif, dan Inovatif...





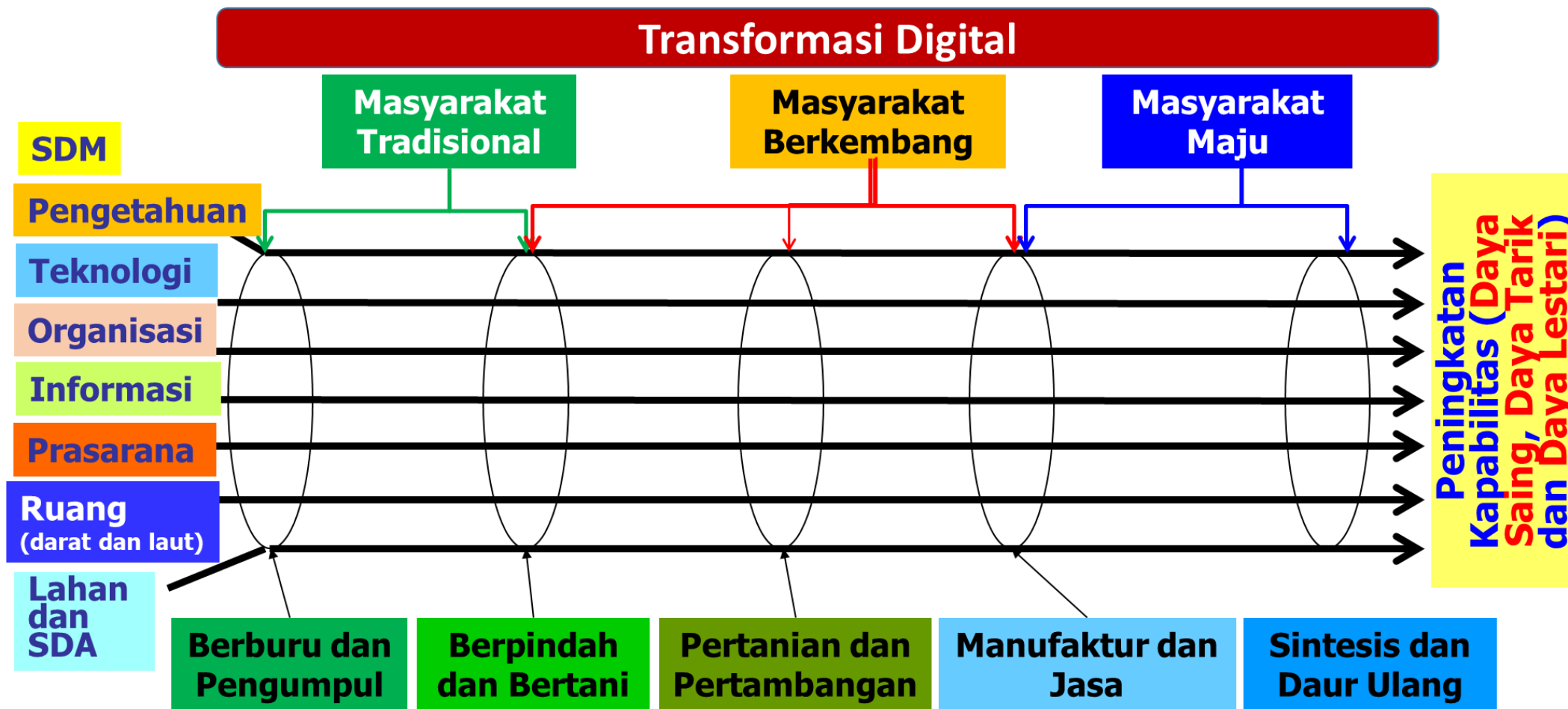
2

TRANSFORMASI DAN AKSELERASI

Perubahan Sosial, Ekonomi dan Teknologi



Transformasi Struktural: ... Sosial, Budaya, Ekonomi dan Teknologi....



Kebijakan pembangunan harus mendorong transformasi dan akselerasi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat menjadi produktif, maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat.

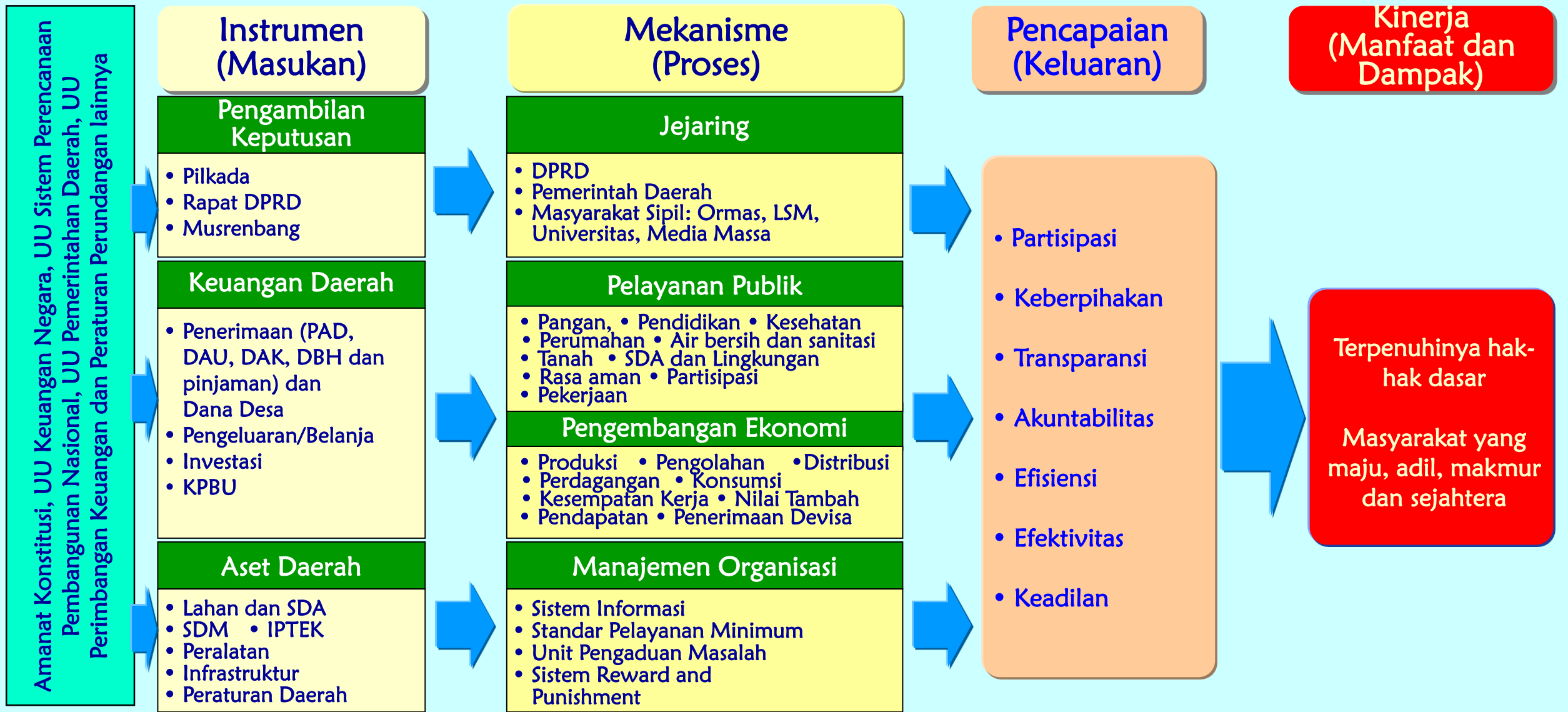


Transformasi Desa, Kawasan dan Daerah

... Keunggulan Komparatif, Kompetitif dan Kolaboratif...



Pelaksanaan Otonomi Daerah Berbasis Pemenuhan Hak Dasar



Waktu



Paradigma Tumbuh Berkelanjutan: ... Build Back Better, More Safer dan Sustainable...

SDGs, Rantai Nilai dan Ekonomi Sirkular

**PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF, INOVATIF, AMAN,
BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF**



**Pembangunan
Ekonomi**



**Kesejahteraan
Masyarakat**



**Kelestarian
Lingkungan**

Dalam mewujudkan pembangunan daerah (kabupaten dan kota) yang aman dan berkelanjutan, maka perlu pemanfaatan ruang dan langkah sistematis dan terencana dalam Pengurangan Risiko, Mitigasi, Adaptasi dan Investasi Berbasis Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim.



Mengembangkan Kehidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood)



Modal Manusia

- Gizi dan kesehatan
- Pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian
- Etika, moralitas, sikap, dan perilaku
- Kesetaraan dan Keadilan Gender
- Kapasitas untuk bekerja dan wirausaha
- Kapasitas untuk beradaptasi

Modal Sosial

- Jaringan dan relasi
- Hubungan saling percaya dan toleransi
- Partisipasi
- Kepemimpinan lokal
- Peraturan bersama dan sanksi

Modal Alam

- Lahan
- Sumber daya air dan kelautan
- Hutan dan pepohonan
- Margasatwa
- Keanekaragaman hayati
- Jasa lingkungan

5
DIMENSI

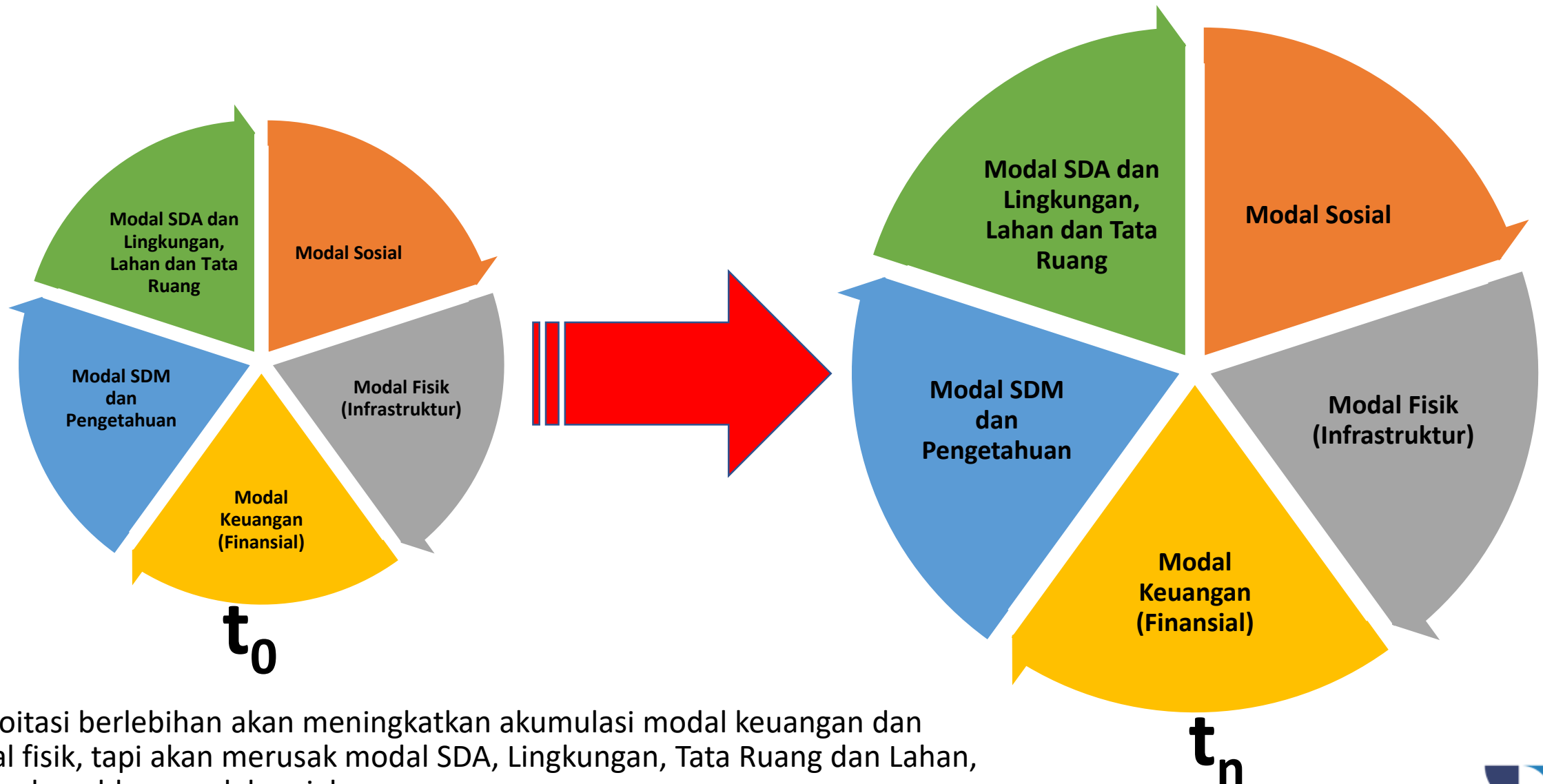
Modal Fisik

- Prasarana dasar: rumah, air bersih, listrik dan sanitasi
- Konektivitas: transportasi dan telekomunikasi
- Peralatan dan Teknologi

Modal Ekonomi (finansial)

- Investasi Pemerintah
- Investasi Swasta
- Perbankan
- Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
- Pinjaman dan Hibah

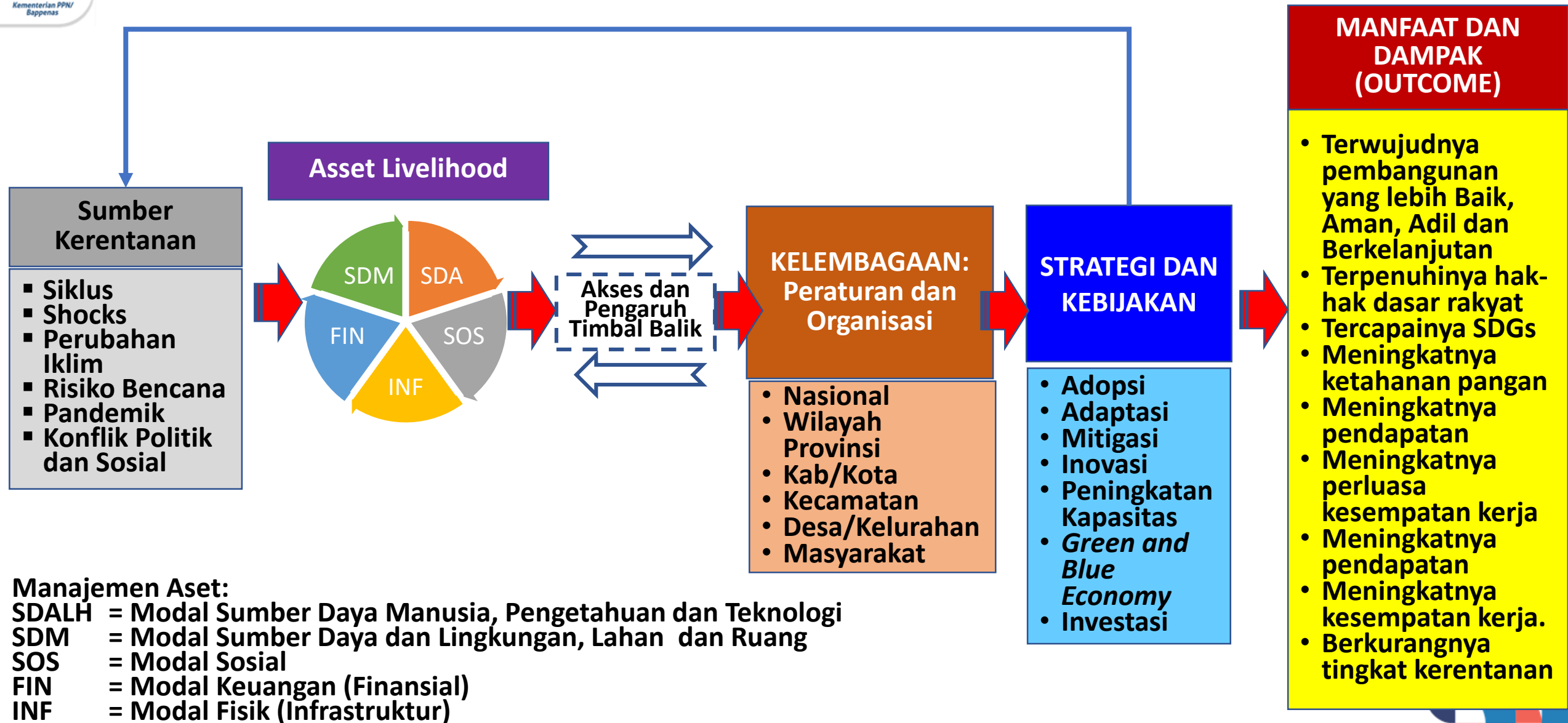
Pembangunan sebagai Proses Akumulasi Berkeadilan dan Berkelanjutan



Eksplorasi berlebihan akan meningkatkan akumulasi modal keuangan dan modal fisik, tapi akan merusak modal SDA, Lingkungan, Tata Ruang dan Lahan, dan melemahkan modal sosial.



Pendekatan Kesejahteraan Berkelanjutan: Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan



Manajemen Aset:
 SDALH = Modal Sumber Daya Manusia, Pengetahuan dan Teknologi
 SDM = Modal Sumber Daya dan Lingkungan, Lahan dan Ruang
 SOS = Modal Sosial
 FIN = Modal Keuangan (Finansial)
 INF = Modal Fisik (Infrastruktur)

Pengembangan Rantai Nilai Daerah

Keterkaitan Produksi-Pengolahan-Transportasi-Logistik-Pasar



Reforma Agraria

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

Transformasi Digital

1. Satu Data Satu Peta
2. RTRW
3. KLHS
4. Kajian dan Peta Risiko Bencana
5. Kajian Neraca Air
6. Kajian dan Peta Sosial Budaya

1. Lahan
2. Benih/Bibit
3. Pupuk
4. Pestisida
5. Tenaga Kerja
6. Peralatan
7. Teknologi

1. Air Bersih
2. Listrik
3. Tenaga Terdidik dan Terlatih
4. Peralatan dan Mesin
5. Teknologi

1. Pergudangan
2. Jalan dan Jembatan
3. Angkutan Kapal
4. Angkutan Udara
5. Angkutan Sungai, Laut dan Danau

1. Pergudangan
2. Bandara dan Angkutan Udara
3. Pelabuhan dan Angkutan Laut

1. Informasi pasar
2. Promosi
3. Kerjasama Pembiayaan dan Pemasaran

Lokal

Input produksi

Produksi

Pengolahan

Distribusi

Logistik dan Transportasi

Pasar

Ekspor

1. Petani
2. Nelayan
3. UMKM
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Kelautan
6. Dinas Tata Ruang
7. Kementan
8. KemenKelautan
9. Kemen ATR/BPN
10. BUMN
11. Perusahaan

1. UMKM
2. Swasta
3. Kemeperin
4. Kemenristek/BPPT
5. Kemen BUMN
6. Dinas Pertanian
7. Dinas Perindustrian

1. KemenPUPera
2. Kemenhub
3. Dinas Perhubungan

1. Kemenhub
2. KemenPUPera
3. Kemendag
4. BUMN
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Perdagangan

1. Kemenhub
2. Kemendag
3. Kemenlu
4. Bea Cukai
5. BUMN
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Perdagangan

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

Komoditas Unggulan:

- Pertanian: Padi, Jagung, Ubi Kayu, dll
 Perkebunan: Sawit, Kelapa, Kakao, Tebu, dll
 Perikanan: rumput laut, ikan, udang, dll
 Industri: IRT, Industri Pengolahan
 Pertambangan: migas dan non migas
 Pariwisata: wisata alam, budaya, religi, kuliner, dll

Tugas dan Peran Bappenas, KL dan Bappeda:

1. Memetakan rantai nilai (value chain) setiap kawasan
2. Menganalisis hambatan (*bottlenecks*) dan penyebabnya
3. Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5. Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhitungkan kerangka regulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.

Pengembangan Rantai Nilai Pariwisata Daerah

Keterkaitan Transportasi-Akomodasi-Destinas-Atraksi-Pasar



Reforma Agraria

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

Transformasi Digital

1. Satu Data Satu Peta
2. RTRW
3. KLHS
4. Kajian dan Peta Risiko Bencana
5. Kajian Neraca Air
6. Kajian dan Peta Sosial Budaya

1. Intermoda
2. Angkutan Darat
3. Bandara dan Angkutan Udara
4. Pelabuhan dan Angkutan Laut

1. Hotel dan Motel
2. Air Bersih
3. Listrik
4. Internet
5. Tenaga Terdidik dan Terlatih

1. Wisata Alama
2. Wisata Bahari
3. Wisata Kuliner
4. Wisata Religi
5. Wisata Budaya
6. Wisata Olah Raga

1. Festival Seni dan Budaya
2. Festival Keagamaan
3. Festival Kuliner
4. Atraksi Wisata
5. Kompetisi Olah Raga

1. Industri Kerajinan
2. Industri Rumah Tangga
3. Industri Tekstil
4. Industri Makanan dan Minumamn

Domestik

Rencana Wisata

Transportasi

Akomodasi

Destinasi dan Atraksi

Amenitas: Kuliner dan Hiburan

Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Transportasi

1. Kemenhub
2. KemenPUPera
3. BUMN
4. BUMD
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas PU
8. Dinas Perdagangan

1. UMKM
2. Swasta
3. Kemenpar
4. Kemen BUMN
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas ESDM
7. Dinas PU
8. Dinas Kominfo

1. Pemerintah Desa
2. UMKM
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata

1. Pemerintah Desa
2. UMKM
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata

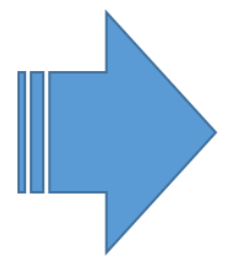
1. UMKM
2. Pelaku Usaha
3. Dinas Perindag
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perikanan
6. Kemendag
7. Bea Cukai
8. BUMN

Internasional

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

Pariwisata Unggulan:

1. Wisata Alam
2. Wisata Bahari
3. Wisata Kuliner
4. Wisata Religi
5. Wisata Budaya
6. Wisata Sejarah
7. Wisata Olah Raga

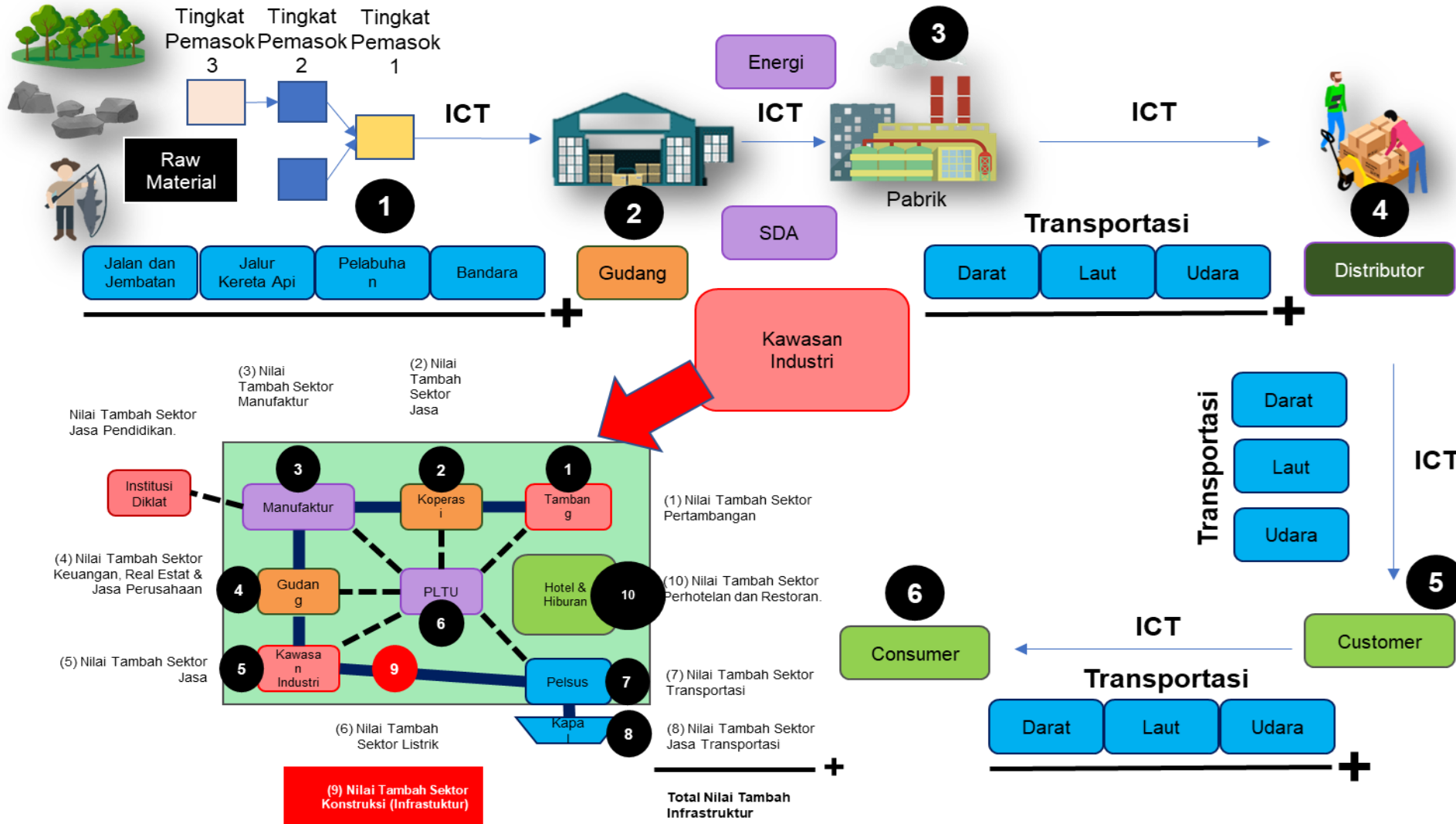


Tugas dan Peran Bappenas, Pemda dan K/L:

1. Memetakan rantai nilai (value chain) setiap jenis pariwisata
2. Menganalisis hambatan (*bottlenecks*) dan penyebabnya
3. Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5. Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhtitungkan kerangka regulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.



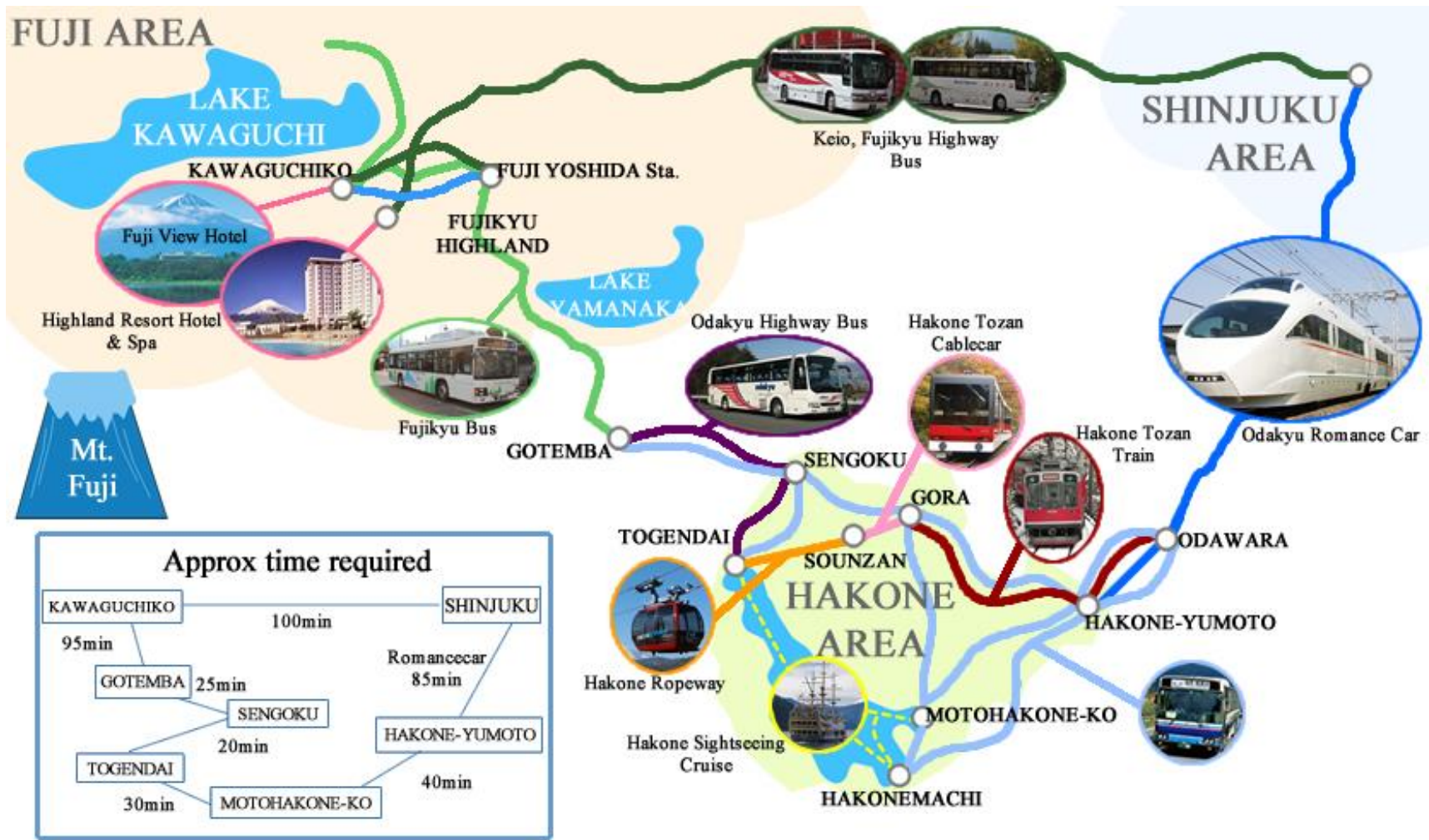
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN RANTAI NILAI



Sudut pandang → Kawasan Percepatan Infrastruktur



Pengembangan Rantai Nilai Pariwisata Daerah Keterkaitan Tokyo-Hakone—Yamanaka-Kawaguchi



Approx time required

KAWAGUCHIKO	100min	SHINJUKU
GOTEMBA	25min	SENGOKU
TOGENDAI	20min	HAKONE-YUMOTO
MOTOHAKONE-KO	30min	HAKONE-YUMOTO
	40min	
	85min	

Note: Romancecar route from Shinjuku to Hakone-Yumoto is 85min.

With Hakone Freepass you can freely get on and off the following as often as you need!

- Hakone Tozan Train
- Hakone Tozan Cable Car
- Hakone Ropeway
- Hakone Sightseeing Cruise
- Hakone Tozan Bus (designated zones)
- Odakyu Hakone Highway Bus (designated zones)
- Tokai Bus Orange Shuttle (designated zones)
- "KANKO SHISETSU-MEGURI" Bus (Tourist-facilities Round Bus) (operated by Hakone Tozan Bus)

● This is how much you save doing a simple round visit like this from Shinjuku!

Regular Fare		Hakone Freepass	
Adult	6,610 yen	Adult	5,140 yen
Child	3,320 yen	Child	1,500 yen
		You save	
		Adult	1,470 yen
		Child	1,820 yen

In the case of regular fares

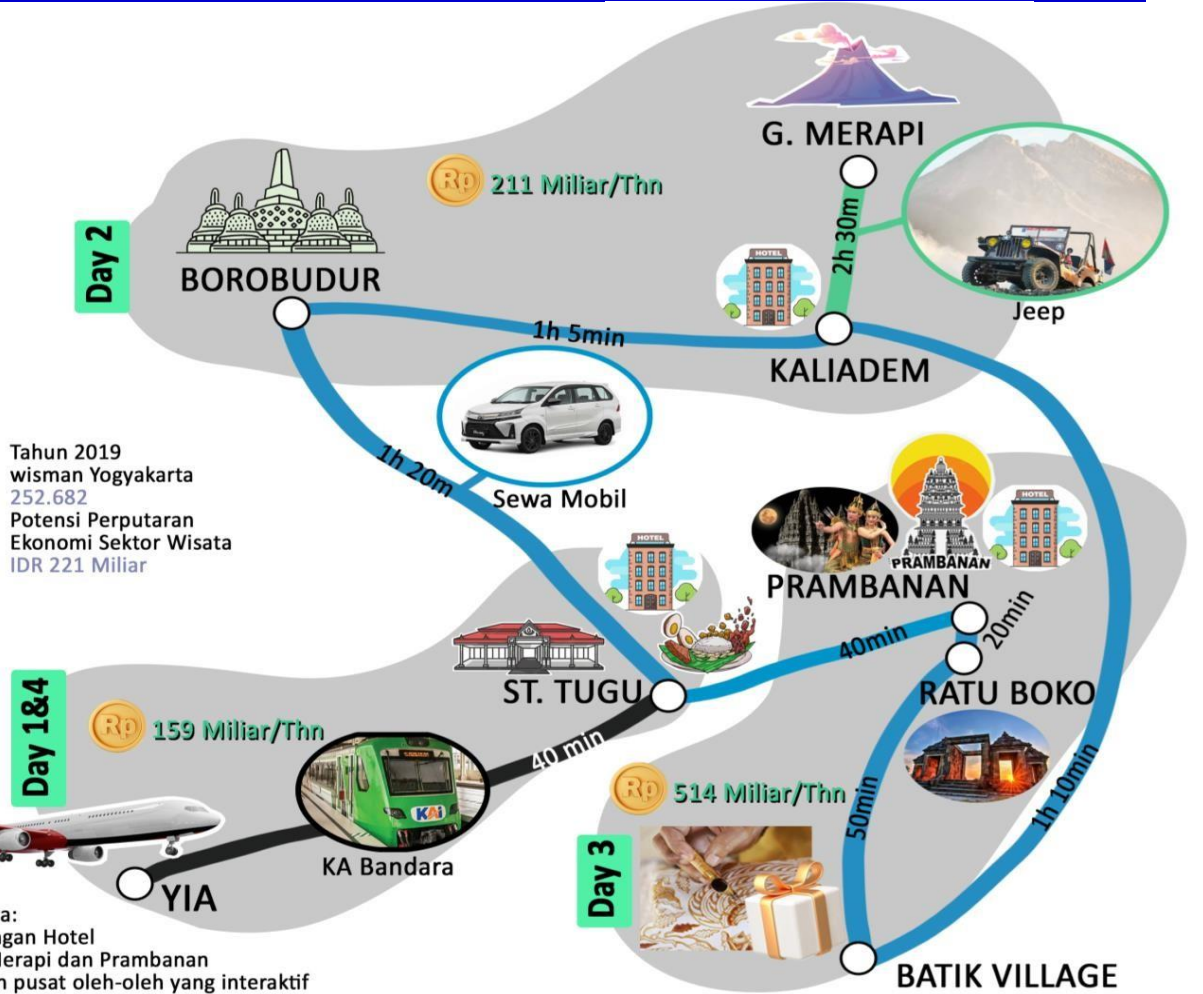
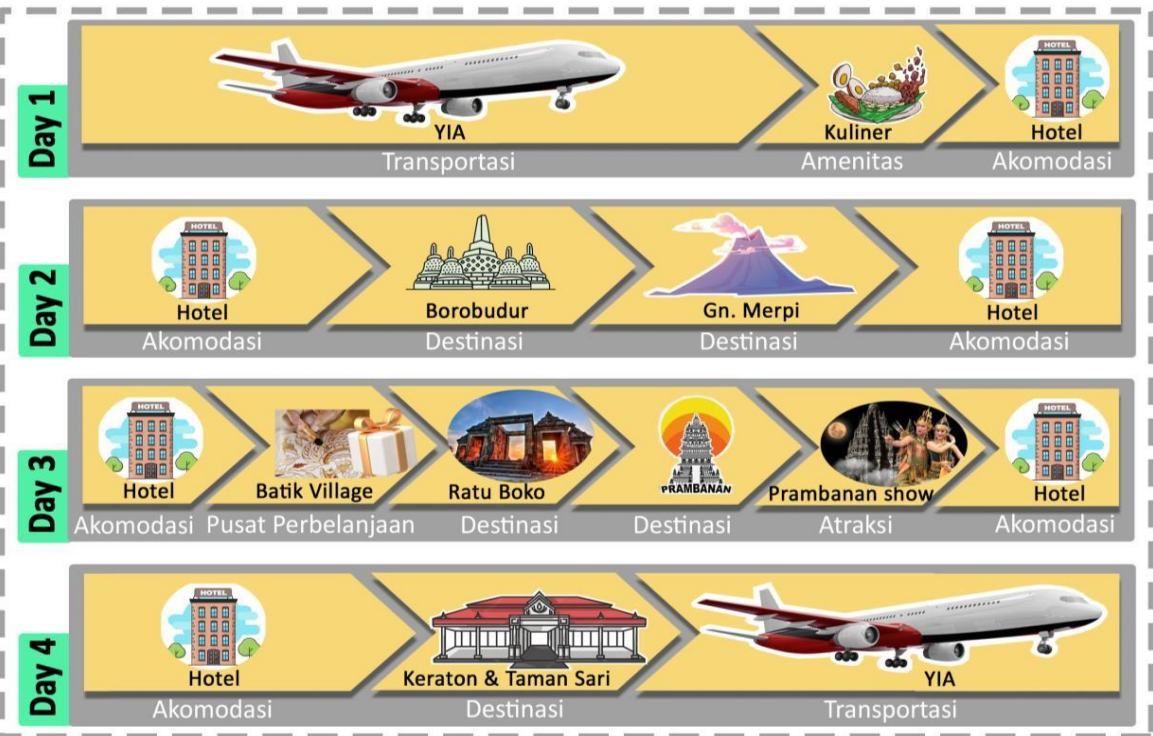
Shinjuku	Odakyu Line + Hakone Tozan Line	Hakone -Yumoto	Hakone Tozan Train	Gora	Hakone Tozan Cable Car	Sounzan	Hakone Tozan Ropeway	Togendai
Adult	1,190 yen	Adult	400 yen	Adult	420 yen	Adult	1,450 yen	
Child	600 yen	Child	200 yen	Child	210 yen	Child	730 yen	

**Additional express fare is required for the Romancecar.*

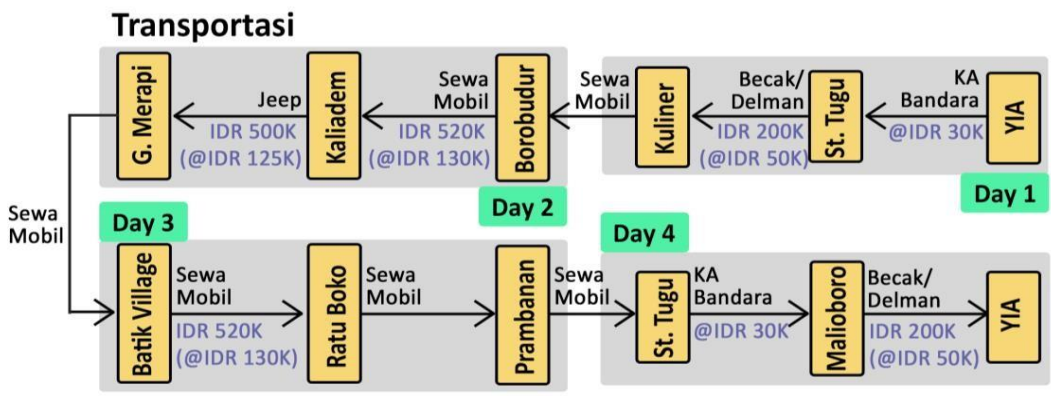
Total	Adult	6,610 yen	Child	3,320 yen	
Shinjuku	Odakyu Line + Hakone Tozan Line	Hakone -Yumoto	Hakone Tozan Bus	Hakone -machi	Hakone Sightseeing Cruise
Adult	1,190 yen	Adult	960 yen	Adult	1,000 yen
Child	600 yen	Child	480 yen	Child	500 yen

**Additional express fare is required for the Romancecar.*

Pengembangan Rantai Nilai Pariwisata Daerah Brobudur-Prambanan dan sekitarnya



Tahun 2019
wisman Yogyakarta
252.682
Potensi Perputaran
Ekonomi Sektor Wisata
IDR 221 Miliar



- Potensi lainnya:
1. Pengembangan Hotel di sekitar Merapi dan Prambanan
 2. Peningkatan pusat oleh-oleh yang interaktif (keg. membuat dengan output akhir menjual ke turis)

TOTAL 4 Days:
@IDR 545K
Potensi Integrated Transport system (Freepass)

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
Konsumsi: IDR175K Hotel: IDR500K (@IDR250K) Transport: IDR 80K	Wisata: IDR350K Konsumsi: IDR235K Hotel: IDR500K (@IDR250K) Transport: IDR255K	Oleh2: IDR550K Wisata: IDR960K Konsumsi: IDR275K Hotel: IDR500K (@IDR250K) Transport: IDR255K	Wisata: IDR 28K Konsumsi: IDR175K Transport: IDR255K
			Rata-rata pengeluaran harian wisatawan non-transport IDR 874,5K

Perhitungan Rantai Nilai Kelapa Sawit Lampung dalam Setahun



Hasil produksi **Tandan Buah Segar (TBS)** Kelapa Sawit di **Lampung** tahun **2020** adalah sebesar **198 ribu ton**. Apabila TBS ini dijual sebagai **bahan mentah** akan berkontribusi terhadap **pendapatan Lampung** sebesar **Rp 412 Miliar**. Apabila penjualan dilakukan dalam bentuk **Crude Palm Oil (CPO)**, pendapatan provinsi menjadi **Rp 901 Miliar**. Sementara itu, apabila **hilirisasi** dilakukan hingga menjadi produk **minyak goreng** pendapatan daerah menjadi **Rp 1,7 Triliun**.

Sumber: Analisis perhitungan sangat sementara

Berdasarkan analisis, hasil penjualan komoditas **kelapa sawit** dalam bentuk **Minyak Goreng** memiliki nilai jual sekitar **4 kali lipat** dibandingkan **harga jual TBS**. Oleh karena itu, **hilirisasi** penjualan TBS perlu di dorong untuk peningkatan **penerimaan daerah**.

Harga jual yang digunakan:

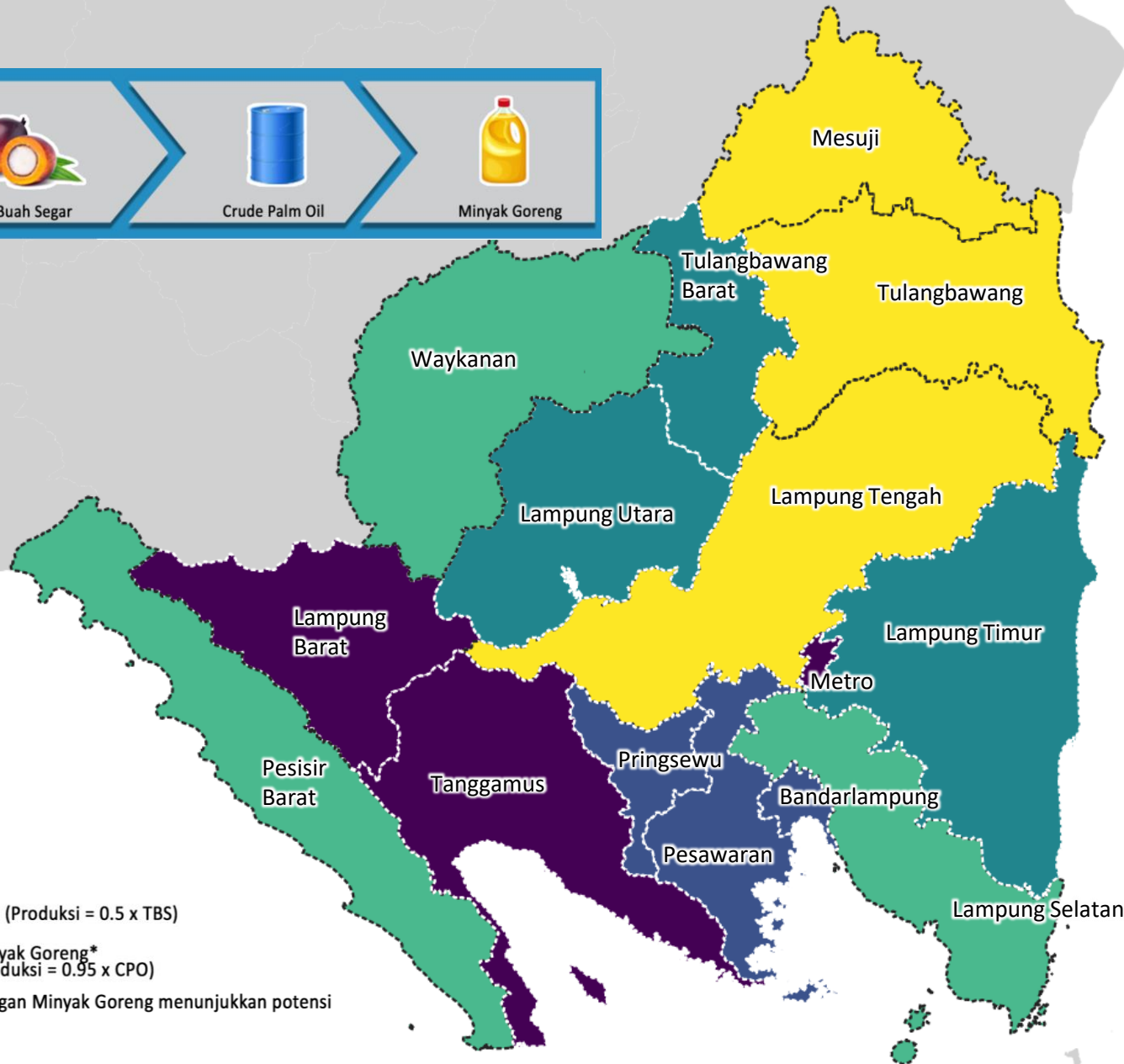
- **TBS:** Rp 2.083/kg
- **CPO:** Rp 9.122/kg
- **Minyak Goreng:** Rp 18.000/kg

- TBS
- CPO (Produksi = 0.5 x TBS)
- Minyak Goreng* (Produksi = 0.95 x CPO)

*Perhitungan Minyak Goreng menunjukkan potensi

TBS K Ton (Harga); CPO K Ton (Harga); Minyak Goreng K Ton (Harga)

- < 0,1 (< Rp0,3 M); < 0,07 (< Rp0,6 M); < 0,06 (Rp1,1 M)
- 2,8 (Rp6 M); 1,4 (Rp13 M); 1,3 (Rp24 M)
- 8,5 (Rp18 M); 4,25 (Rp39 M); 4 (Rp73 M)
- 30 (Rp62 M); 15 (Rp137 M); 14 (Rp257 M)
- 50 (Rp104 M); 25 (Rp228 M); 24 (Rp428 M)





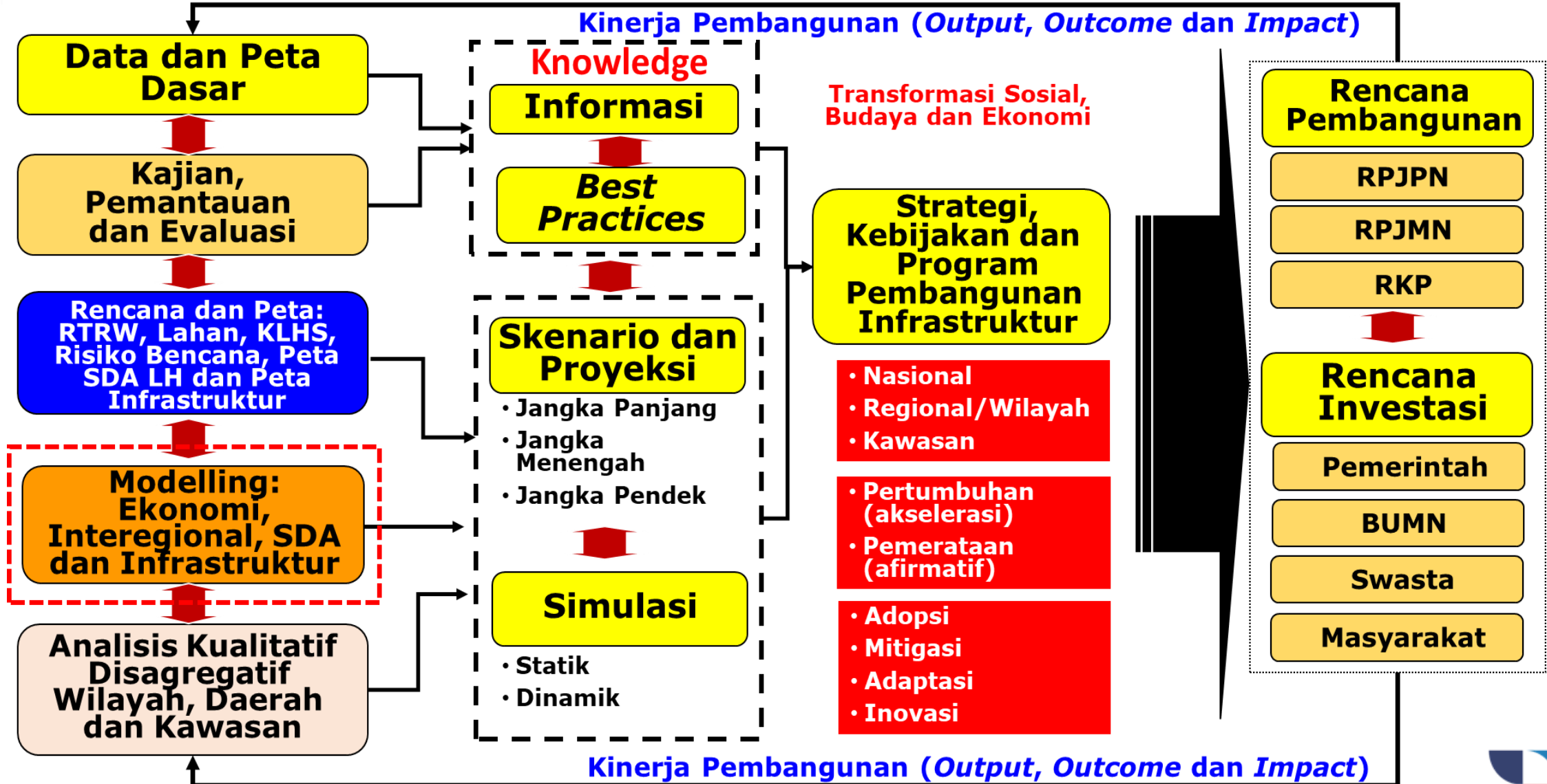
3

PERENCANAAN BERBASIS KINERJA

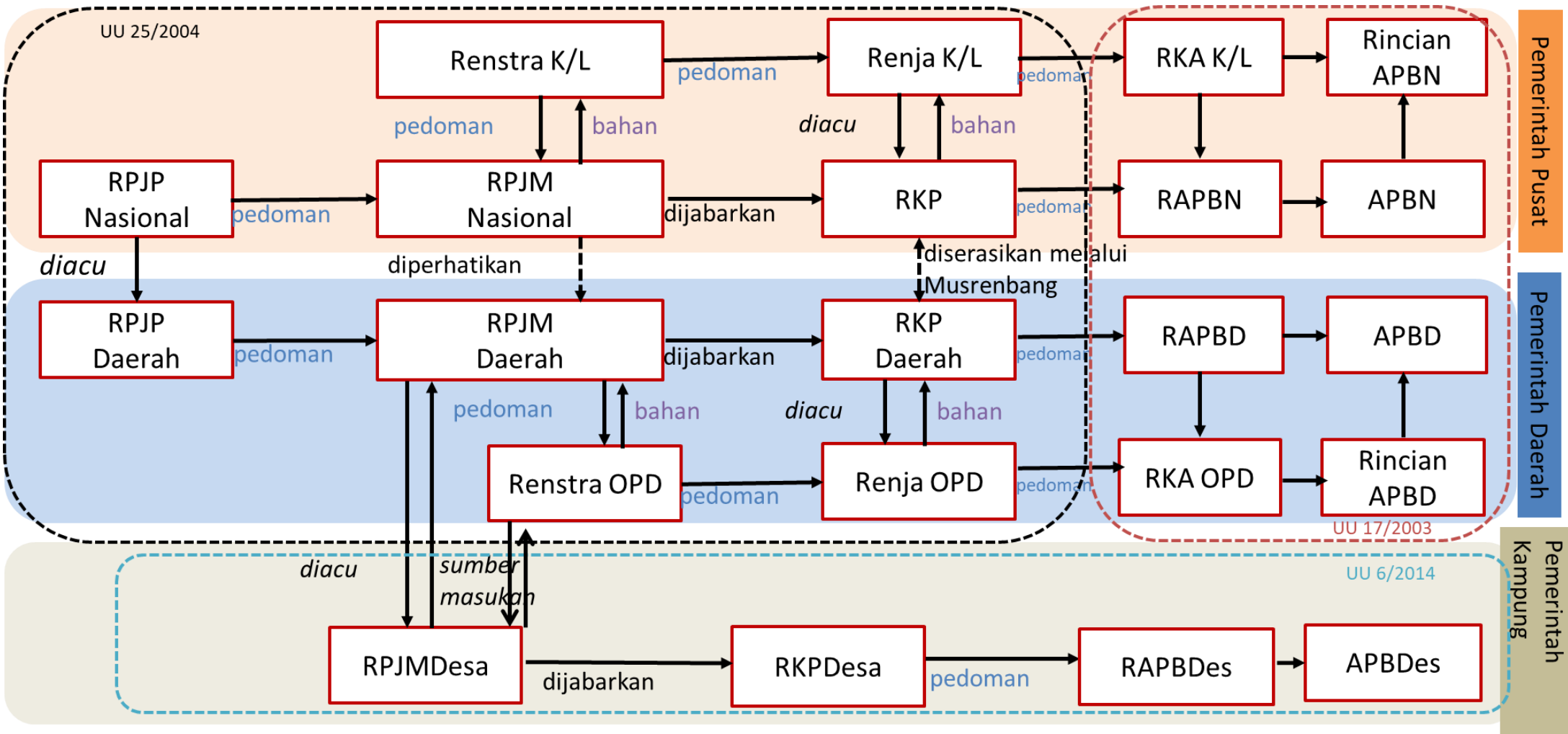
Penguatan Basis Keunggulan dan Penguatan Konektivitas



Alur Pikir Perencanaan



Alur Pikir Perencanaan



Sinkronisasi Perencanaan



RPJMD PROVINSI

Visi	Misi	Program	OPD	Sasaran	Indikator Kinerja
				▲	●

RPJMD KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja	Sasaran	OPD	Program	Misi	Visi
●	▲				

RENSTRA OPD PROVINSI

Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Dana	Lokasi (Kab/kota)
		▲	●	😊	●

RENSTRA OPD KABUPATEN/KOTA

Dana	Indikator Kinerja	Sasaran	Kegiatan	Program
😊	●	▲		

Konsistensi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota: kegiatan, sasaran dan indikator kinerja.
 RPJMD Provinsi = Σ Renstra OPD Provinsi (progrgam, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan anggaran)



Simulasi Sinkronisasi Perencanaan

RKP

Prioritas	Fokus	Kegiatan	K/L	Sasaran	Indikator Kinerja
Kemiskinan	Perluasan akses kesehatan	Pemberian beasiswa SD/SMP	Pendidikan	225,9 ribu siswa SD/ SMP miskin	Jumlah siswa SD/SMP miskin

Indikator Kinerja	Sasaran	OPD	Kegiatan	Fokus	Prioritas
Jumlah siswa SD/SMP miskin	12 ribu siswa SD/ SMP miskin	Dinas Pendidikan	Pemberian beasiswa	Perluasan akses pendidikan	Kemiskinan

RENJA K/L: KESEHATAN

Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Dana (Rp)	Lokasi (Provinsi)
Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun	Pemberian beasiswa SD/ SMP	10 ribu siswa	Jumlah siswa SD/SMP miskin	46 miliar	X1
		225,9 ribu siswa		1,3 triliun	Y 33 Prov

RENJA DINAS KESEHATAN PROV.X1

Dana	Indikator Kinerja	Sasaran	Kegiatan	Program
46 miliar (DK) 9,6 miliar (APBD)	Jumlah siswa SD/SMP miskin	10 ribu siswa 2 ribu siswa	Pemberian beasiswa SD/ SMP	Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun

RENJA DINAS KESEHATAN KAB.X1.1

Dana	Indikator Kinerja	Sasaran	Kegiatan	Program
2,4 miliar (DK) 960 juta (APBD)	Jumlah siswa SD/SMP miskin	500 siswa 200 siswa	Pemberian beasiswa SD/ SMP	Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun



Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja



Pengertian

- Sistem perencanaan dan penganggaran yang disertai tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- Meningkatkan efektivitas anggaran melalui perencanaan program dan kegiatan yang disertai dengan hasil dan keluaran yang terukur;
- Meningkatkan efisiensi belanja melalui penentuan satuan biaya sesuai standar yang ditetapkan;
- Memperkuat pengawasan dan pengendalian melalui kelayakan standar harga dan biaya, audit keuangan dan kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal; dan
- Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas.

Manfaat

- Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci
- Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program
- Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja
- Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja
- Membantu dalam menetapkan target kinerja\



Tujuan dan Landasan Konseptual

Tujuan

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Landasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*Money follow function*).



Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja



1. SATUAN KERJA

SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

2. KEGIATAN

RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN YANG DITENTUKAN

3. KELUARAN

SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN

4. STANDAR BIAYA

PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERISFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS)

5. JENIS BELANJA

PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI

1 s/d 5 dimuat
didalam dokumen
anggaran



Pengertian Indikator Kinerja

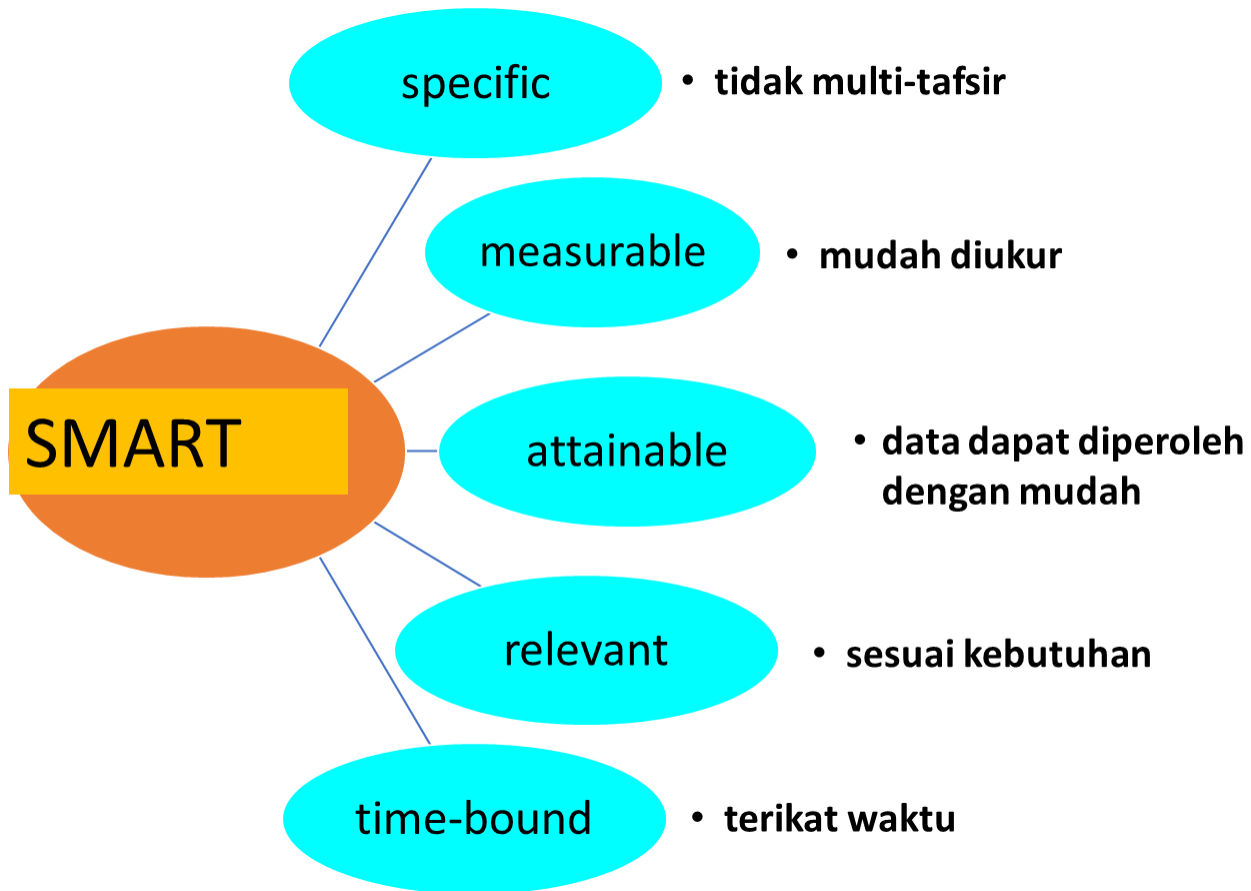
- Merupakan standar kinerja (*performance*) yang harus dicapai → Mengukur sukses atau tidaknya OPD (dinas, badan, kantor).
- Untuk mencapai tujuan organisasi → Realisasi visi, misi, tujuan dan sasaran.
- Menjawab berapa (kuantitatif), bagaimana (kualitas), Kapan (waktu), dan dimana (lokasi)
- Mempunyai kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, rational* dan *time*)
- Mendorong proses pembelajaran manajemen organisasi bagi setiap Dinas/OPD.
- Menjadi dasar untuk pengendalian dan evaluasi setiap Dinas/OPD.

Karakteristik Indikator Kinerja

- ❖ Sederhana dan mudah dipahami.
- ❖ Dapat diukur.
- ❖ Dapat dikuantifikasikan dalam bentuk rasio, persentase dan angka.
- ❖ Dikaitkan dengan standar (pelayanan minimum) dan target kinerja SKPD.
- ❖ Fokus pada kualitas, efisiensi, keadilan dan pelayanan.
- ❖ Dikaji secara teratur.



Kriteria dan Jenis Indikator Kinerja



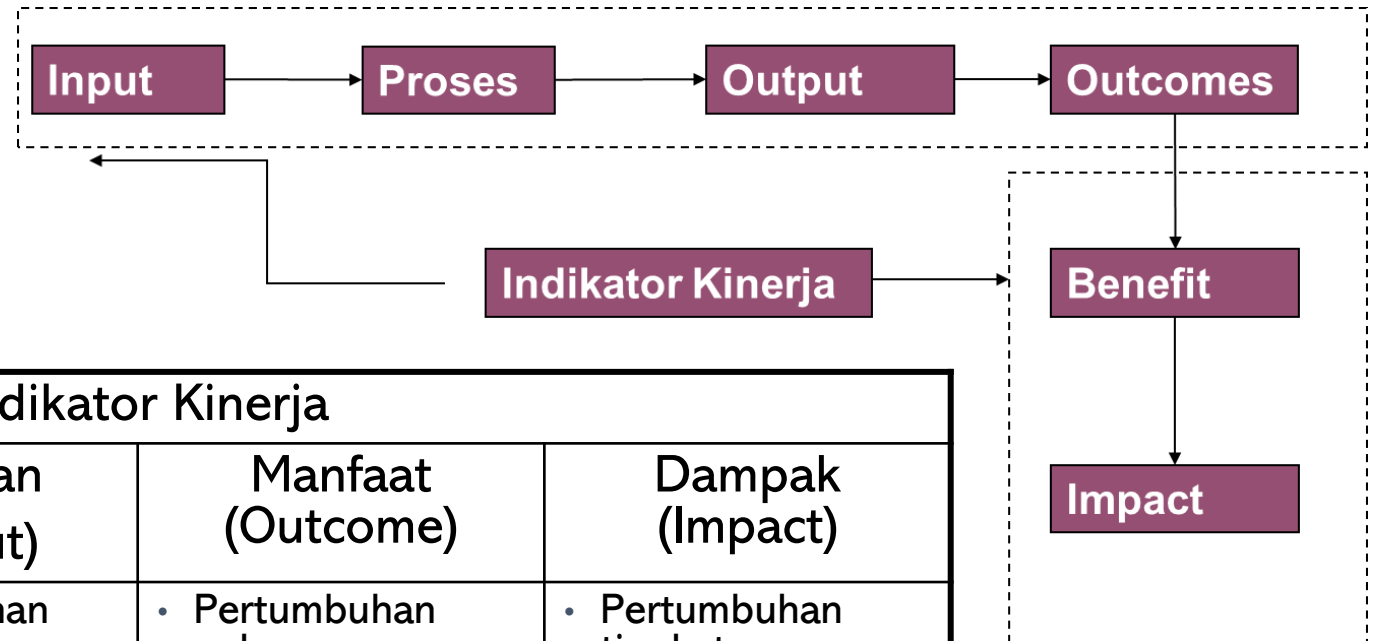
1. Indikator Masukan (Inputs): mengukur jumlah sumber daya seperti: anggaran, tenaga kerja (SDM), peralatan, bahan pedoman, juklak/juknis, waktu dan input lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Indikator Keluaran (Outputs): lebih menitikberatkan pada hasil fisik yang dicapai seperti jumlah orang yang mengikuti pelatihan, jumlah peraturan yang ditetapkan, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan.
3. Indikator Proses (Process): menekankan pada cara pencapaian tujuan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Contoh: persentase jumlah perempuan terlibat dalam Musrenbang desa/kelurahan
4. Indikator Manfaat (Outcomes): menggambarkan hasil nyata atau manfaat yang diperoleh suatu kegiatan. Contoh: berfungsinya pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat.
5. Indikator Dampak (Impacts): menggambarkan pencapaian tujuan dalam jangka panjang, baik dampak positif maupun dampak negatif. Indikator ini dapat diketahui jika pengukuran dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Pertimbangan Penentuan Indikator Kinerja

1. Biaya pelayanan → mengukur efisiensi yang dinyatakan dalam biaya per unit, bersifat kuantitatif dan finansial. Contoh: biaya perijinan per perusahaan, biaya rawat per pasien.
2. Tingkat pemanfaatan → untuk mengetahui kapasitas sumberdaya organisasi dengan membandingkan tingkat pemanfaatan dan kapasitas yang tersedia.
3. Kualitas pelayanan → kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, kecepatan respon, keramahan, kenyamanan, kebersihan, keamanan
4. Standar pelayanan → untuk memberikan pelayanan publik yang manusiawi. Misalnya: jumlah tempat tidur dan dokter per rumah sakit, jumlah ruang dan guru per sekolah.
5. Cakupan pelayanan → untuk mengetahui tingkat penyediaan layanan dan permintaan. Misalnya: jumlah murid per ruang kelas, jumlah pasien dalam 1 hari layanan.
6. Kepuasan pelanggan → untuk mengetahui hasil suatu pelayanan publik. Misalnya: jumlah pengaduan atau komplain, indeks kepuasan pelanggan dengan melakukan survai kepuasan pelanggan.



Contoh Penentuan Indikator Kinerja



Kegiatan	Indikator Kinerja			
	Masukan (Input)	Keluaran (Output)	Manfaat (Outcome)	Dampak (Impact)
Pengembangan BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah BUMDes (20 unit) Jumlah dana (Rp. 600 Juta) Jumlah pengelola BUMDes (200 orang) 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan pengelola BUMDes terlatih (dari 20% menjadi 80%) 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan pelayanan BUMDes (dari 10% menjadi 90%) 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan tingkat Keuntungan BUMDes (dari 30% menjadi 65%) Pertumbuhan pendapatan petani (dari Rp. 12 juta pertahun menjadi Rp. 24 juta pertahun)
Pelatihan Petani	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Tenaga Penyuluh 100 orang Jumlah Dana Rp. 600 juta 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah petani terampil (dari 50 orang menjadi 100 orang) 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pertumbuhan produksi (5 persen pertahun menjadi 7,5 persen pertahun) 	



Konsistensi dan Keterkaitan Indikator Kinerja

Tujuan RPJMN:
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Tujuan RPJMD:
Mempercepat dan Perluas Pembangunan Ekonomi Daerah

Strategi:
Mengoptimalkan pemberdayaan petani dan nelayan

Arah Kebijakan RPJMD:
Peningkatan Produktivitas Usaha

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Kegiatan 1: Penyediaan Pupuk
Kegiatan 2: Pembangunan Jaringan Irigasi
Kegiatan 3: Pembangunan Jalan Desa
Kegiatan 4: Pelatihan Petani

Indikator Kinerja :

- PDB Sub sektor Pertanian (nasional)
- Pertumbuhan pendapatan petani (nasional)
- Pertumbuhan produksi pertanian (nasional)

Indikator Kinerja :

- PDRB Sub sektor Pertanian (daerah)
- Pertumbuhan pendapatan petani (daerah)
- Pertumbuhan produksi pertanian (daerah)

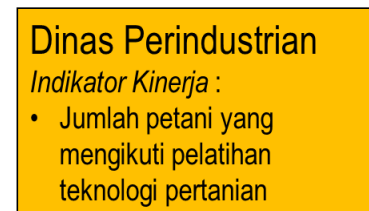
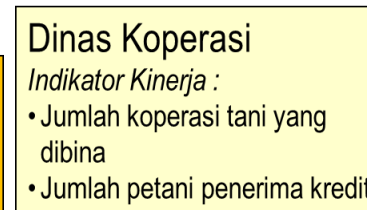
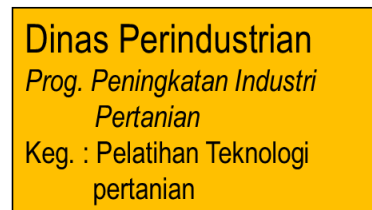
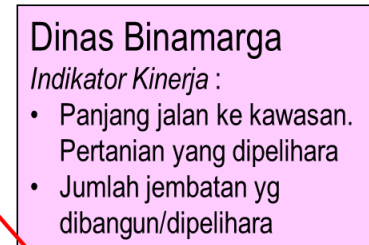
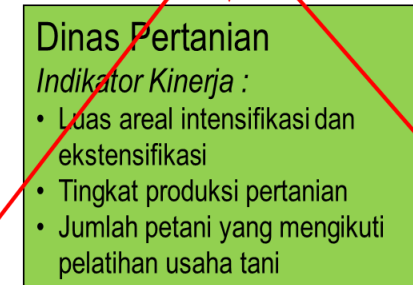
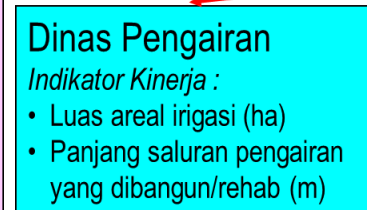
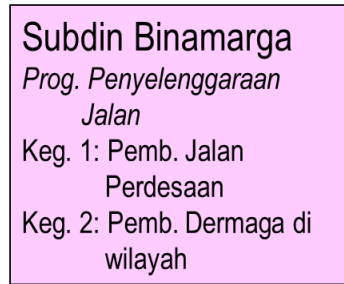
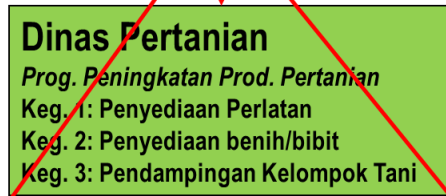
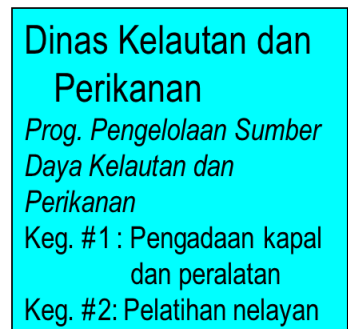
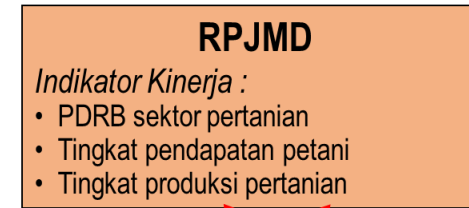
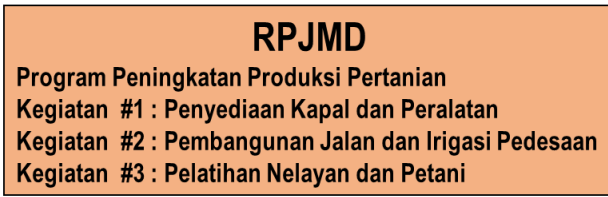
Indikator Kinerja :

- Pertumbuhan Produksi Pertanian

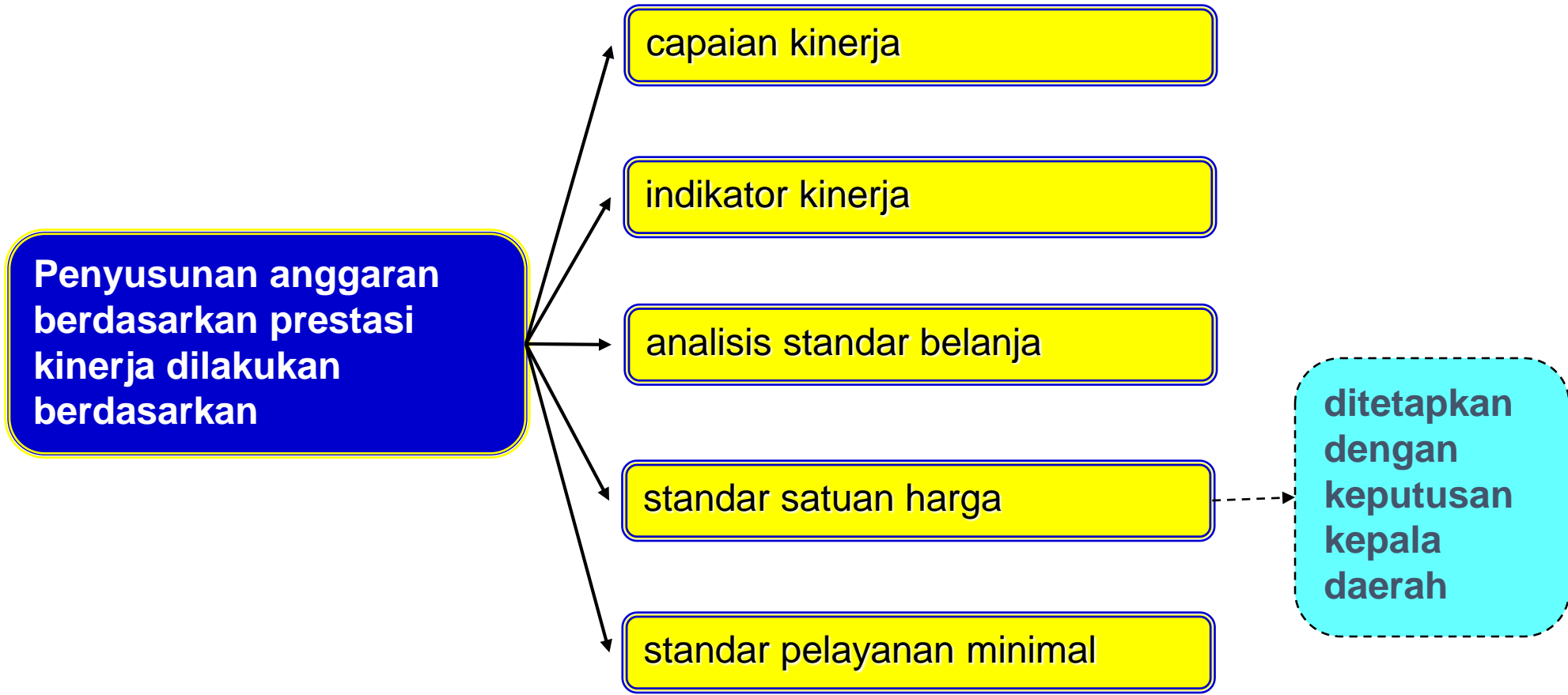
Indikator Kinerja :

- Jumlah penyediaan pupuk
- Panjang jaringan irigasi
- Panjang jalan desa
- Jumlah petani terlatih

Konsistensi dan Keterkaitan Indikator Kinerja



Anggaran Berbasis Kinerja



Anggaran Berbasis Kinerja

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

- Dalam sistem anggaran berbasis kinerja setiap usulan program dan kegiatan selalu dinilai kewajaran nilai atau besaran anggaran.
- Analisis Standar Belanja adalah Standar atau Pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal: KEWAJARAN BEBAN KERJA dan KEWAJARAN BIAYA

PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA

- Keterkaitan logis antara Program/Kegiatan yang diusulkan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara
- Kesesuaian antara Program/Kegiatan yang diusulkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD
- Kapasitas Satuan Kerja untuk Melaksanakan Program/Kegiatan pada tingkat pencapaian yang ditetapkan dalam jangka waktu setahun

PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA

- Keterkaitan antara Biaya yang Dianggarkan dengan Target Pencapaian Kinerja (Standar Biaya)
- Keterkaitan antara Standar Biaya dengan Standar Harga yang Berlaku
- Keterkaitan antara Biaya yang dianggarkan, Target Pencapaian Kinerja dan Sumber Dana
- Keterkaitan antara Jenis Belanja yang seharusnya dengan jenis kegiatan yang dianggarkan.



Kriteria Penentuan Prioritas Anggaran

Kriteria pemilihan kegiatan pokok dan pagu anggaran RKPD, Renja dan RKA-SKPD dengan pemberian bobot.

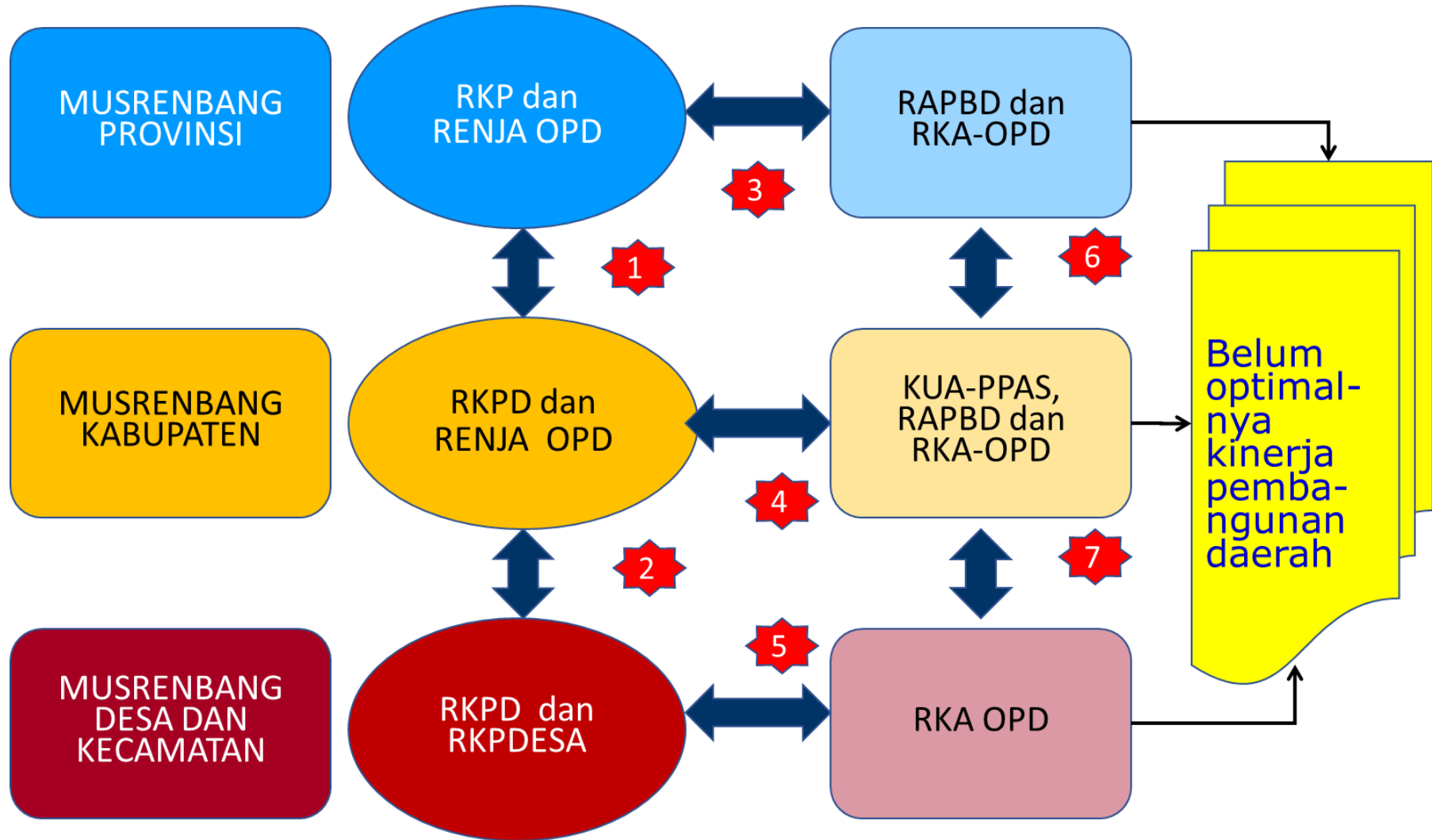
1. Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan RENSTRA SKPD: (1) Kecil, (2) Sedang, (3) Besar
2. Pelaksanaan memerlukan studi kelayakan, pembebasan tanah dan teknis lainnya: (1) Sulit, (2) Sedang, (3) Mudah
3. Waktu: (1) Lama (lebih dari 10 bulan), (2) Sedang (7-10 bulan), (3) Singkat (< 7 bulan)
4. Biaya: (1) Besar (>Rp. 2 miliar), (2) Sedang (Rp.1miliar-2 miliar), (3) Kecil (<Rp.1 miliar)
5. Kelompok sasaran rakyat miskin terutama anak dan perempuan: (1) Rendah (<20%), (2) Sedang (20-50%), (3) Tinggi (>50%)



Titik Kritis Perencanaan



Titik Kritis Penganggaran



Contoh Penentuan Prioritas Kegiatan RKPD

Kegiatan Pokok	Bobot					Jumlah Bobot	Prioritas
	Dampak	Pelaksanaan	Waktu	Biaya	Kelompok Sasaran		
1. Pembelian Kendaraan Dinas	1	3	3	1	1	9	5
2. Revitalisasi Posyandu dan Puskesmas	3	2	2	3	3	13	1
3. Pembangunan Gedung SD	3	2	2	2	3	12	2
4. Pembangunan Jalan	3	1	2	1	3	10	4
5. Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi	3	2	1	2	3	11	3

*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan dan partisipatif.



Contoh Penentuan Prioritas Kegiatan OPD

Kegiatan Pokok	Bobot					Jumlah Bobot	Prioritas
	Dampak	Pelaksanaan	Waktu	Biaya	Kelompok Sasaran		
1. Pembelian Kendaraan Dinas	1	3	3	1	1	9	6
2. Rehabilitasi Gedung	3	1	2	1	3	9	5
3. Peningkatan Kapasitas SDM	3	2	2	2	3	12	1
4. Pengadaan komputer	2	3	2	1	2	10	3
5. Pengembangan Web-site	2	2	2	2	3	11	2
6. Pengadaan peralatan	2	2	2	1	2	9	4

*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan dan partisipatif.





4

KERANGKA LOGIKA PERENCANAAN BERBASIS KINERJA

Masalah, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja



Alur Pikir Perencanaan Berbasis Kinerja



No.	IDENTIFIKASI MASALAH	PERUMUSAN KEBIJAKAN		IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	KINERJA KEBIJAKAN
	Data dan Informasi	Perencanaan (Penentuan Prioritas, Program, Kegiatan, Output dan Lokasi)	Penganggaran (Penentuan Standar Biaya, Standar Harga dan Jenis Belanja)	Manajemen Organisasi (Pemahaman regulasi, SOP, dan akuntansi)	Manfaat dan Dampak
1	SALAH	SALAH	SALAH	SALAH	GAGAL
2	BENAR	SALAH	SALAH	SALAH	GAGAL
3	BENAR	BENAR	SALAH	SALAH	GAGAL
4	BENAR	BENAR	BENAR	SALAH	GAGAL
5	BENAR	BENAR	BENAR	BENAR	BERHASIL



Kriteria Rencana yang Baik dan Realistik

- Rumusan masalah jelas dan spesifik.
- Rumusan Tujuan dan Sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah.
- Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu (*SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit*).
- Rencana kegiatan efektif mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.
- Acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan efektif.
- Rencana kegiatan yang baik menjamin (60%) keberhasilan pelaksanaan kegiatan.



Kerangka Logika Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan

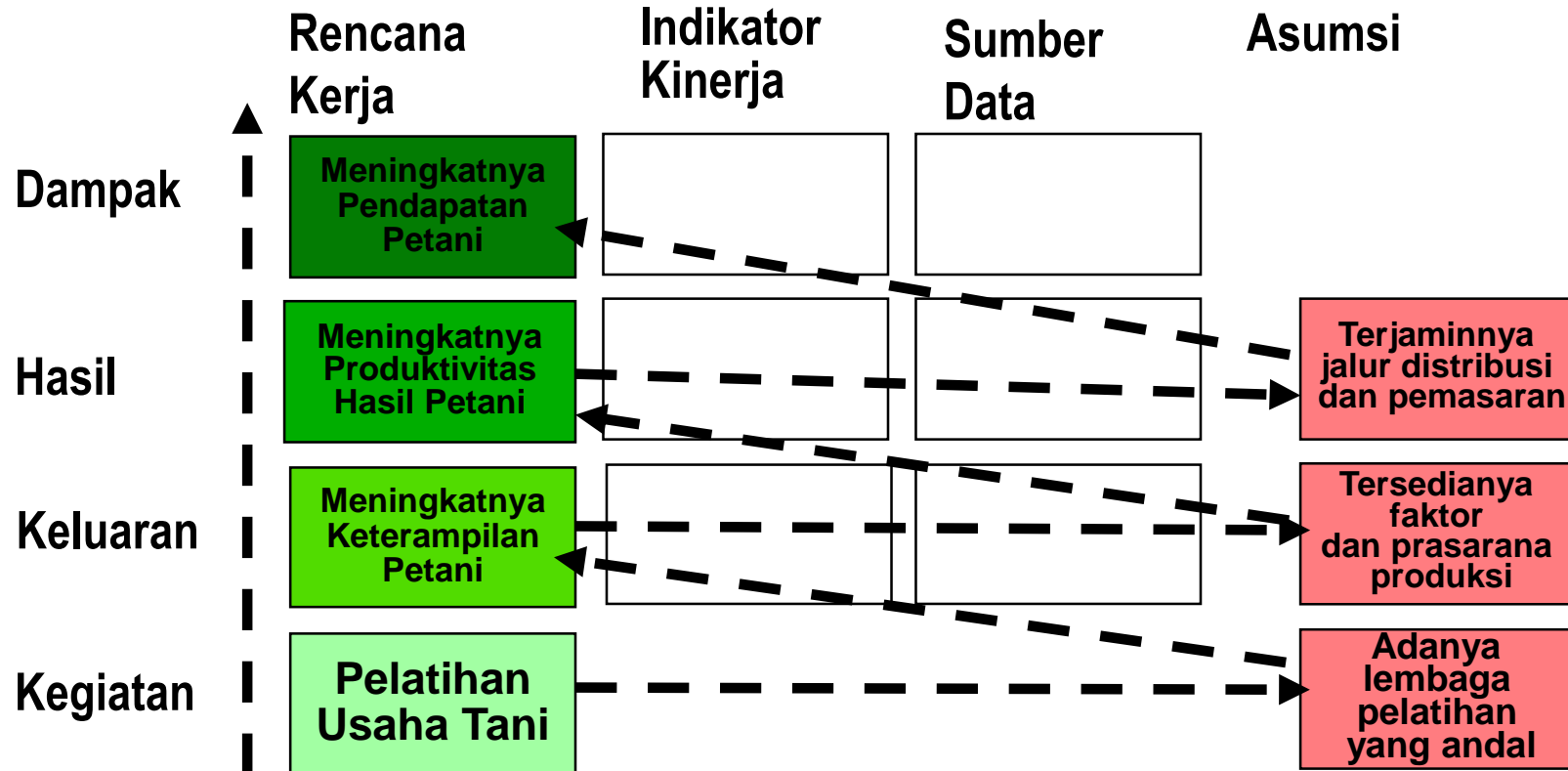


	Ringkasan Rencana Kerja	Indikator kinerja	Sumber data	Asumsi
Dampak	1	8	9	
Hasil yang diharapkan	2	10	11	7
Keluaran	3	12	13	6
Kegiatan (<i>pilihan</i>)	4			5

Catatan: Setelah setiap bagian matriks disusun, kemudian logika dari bagian-bagian lain harus diuji dan direvisi seperlunya. Proses dilakukan secara berulang



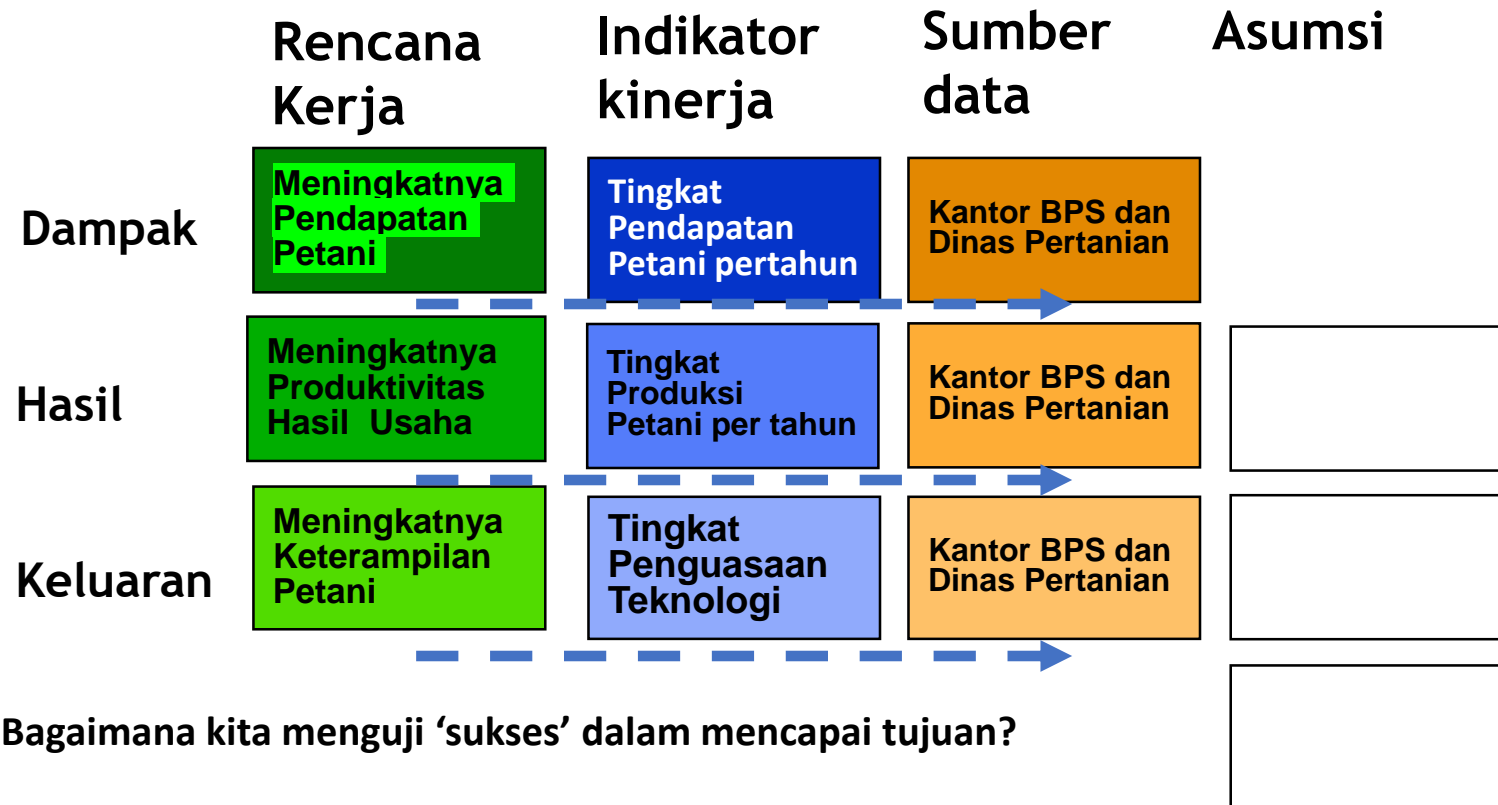
Kerangka Logika Vertikal



- Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi.
- Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan memberikan hasil (*outcome*).
- Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa dampak.



Kerangka Logika Horizontal

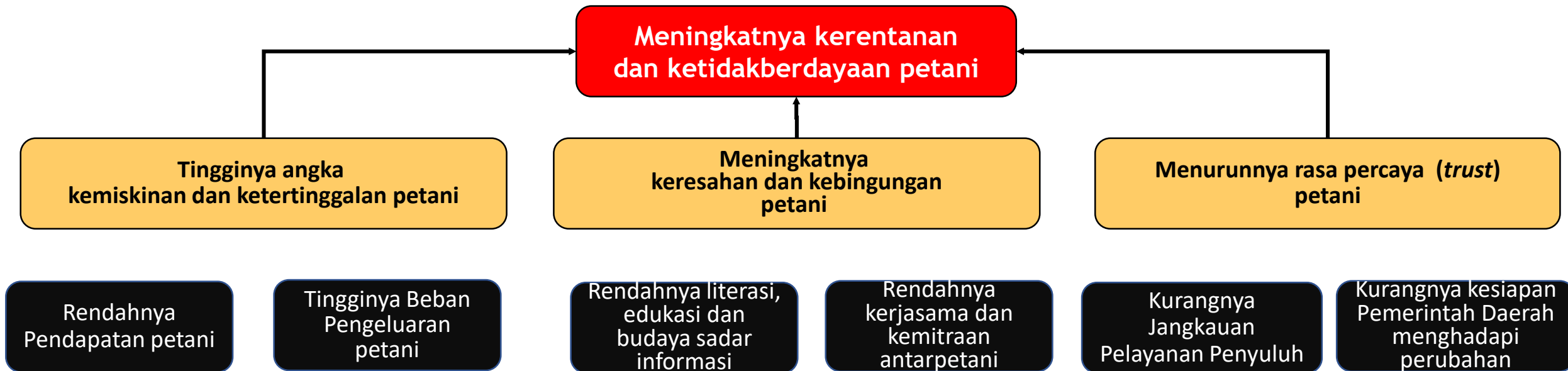


- Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang ditunjukkan dengan indikator kinerja output dan dibuktikan dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis.
- Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan dengan indikator kinerja outcome yang diperoleh dari berbagai sumber data.
- Dampak dari suatu program harus dapat diuji dengan indikator kinerja manfaat dan dampak.



Masalah yang dihadapi petani

Pemahaman masalah dan akar masalah yang dihadapi oleh petani menjadi kunci keberhasilan peningkatan pendapatan petani.



Pohon Masalah Kemiskinan Petani

Tingginya Angka Kemiskinan petani

Terbatasnya Penerimaan petani

Tingginya Pengeluaran petani

Rendahnya Penerimaan Tetap (Usaha Tani)

Terbatasnya Penerimaan Tidak Tetap

Tingginya Pengeluaran Tetap

Tingginya Pengeluaran Tidak Tetap

Rendahnya Produktivitas Hasil Pertanian:
• Terbatasnya Prasarana
• Terbatasnya Keterampilan

Rendahnya Mutu Hasil Pertanian:
• Terbatasnya benih dan bibit
• Terbatasnya teknologi

Rendahnya Harga jual Hasil Pertanian:
• Terbatasnya pemasaran
• Terbatasnya jalur distribusi

Kurangnya Kegiatan Nonpertanian

Tingginya Pengeluaran Rumah Tangga:
1. Makanan
2. Bukan Makanan: Pendidikan, Kesehatan, BBM, Angkutan

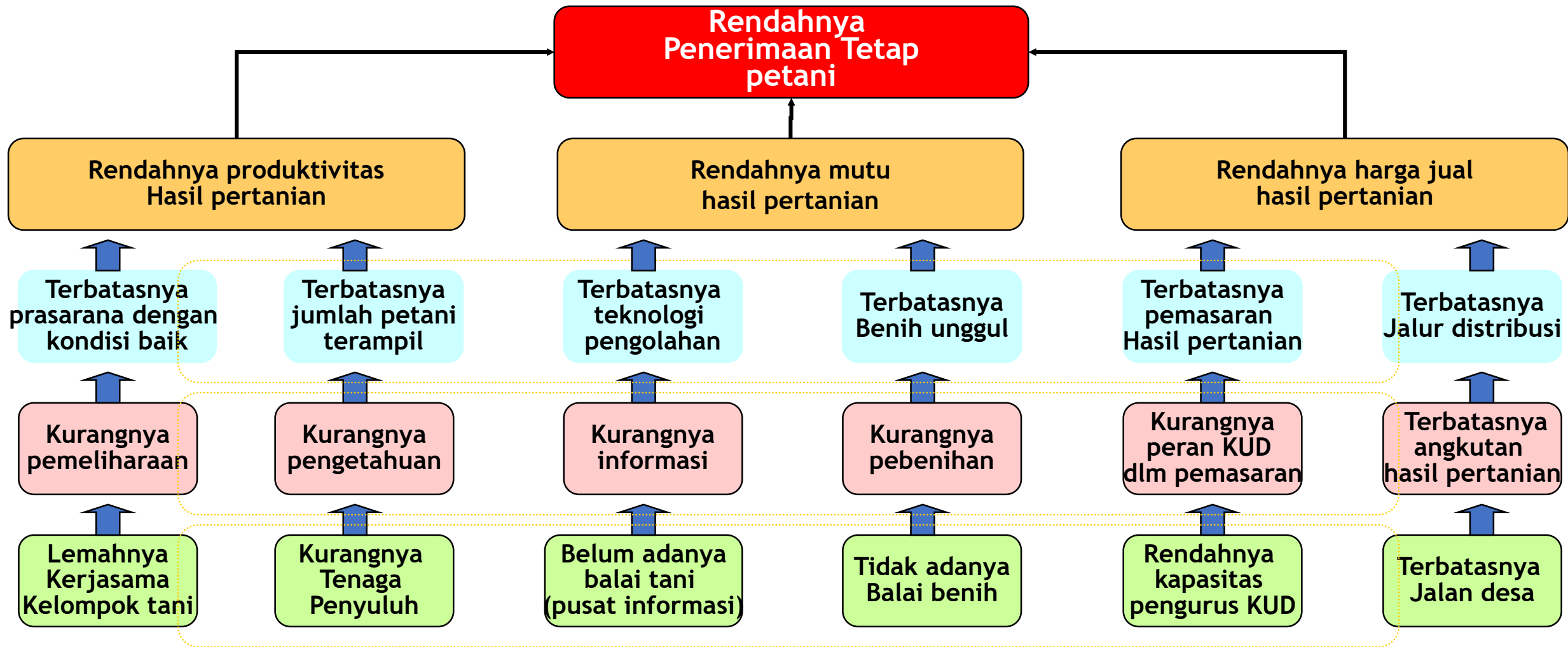
Tingginya Pengeluaran Usaha Tani:
1. Benih dan Bibit
2. Peralatan
3. Upah
4. Pembasmi Hama
5. Angkutan

Tingginya Biaya Sosial

Tingginya Biaya Bencana



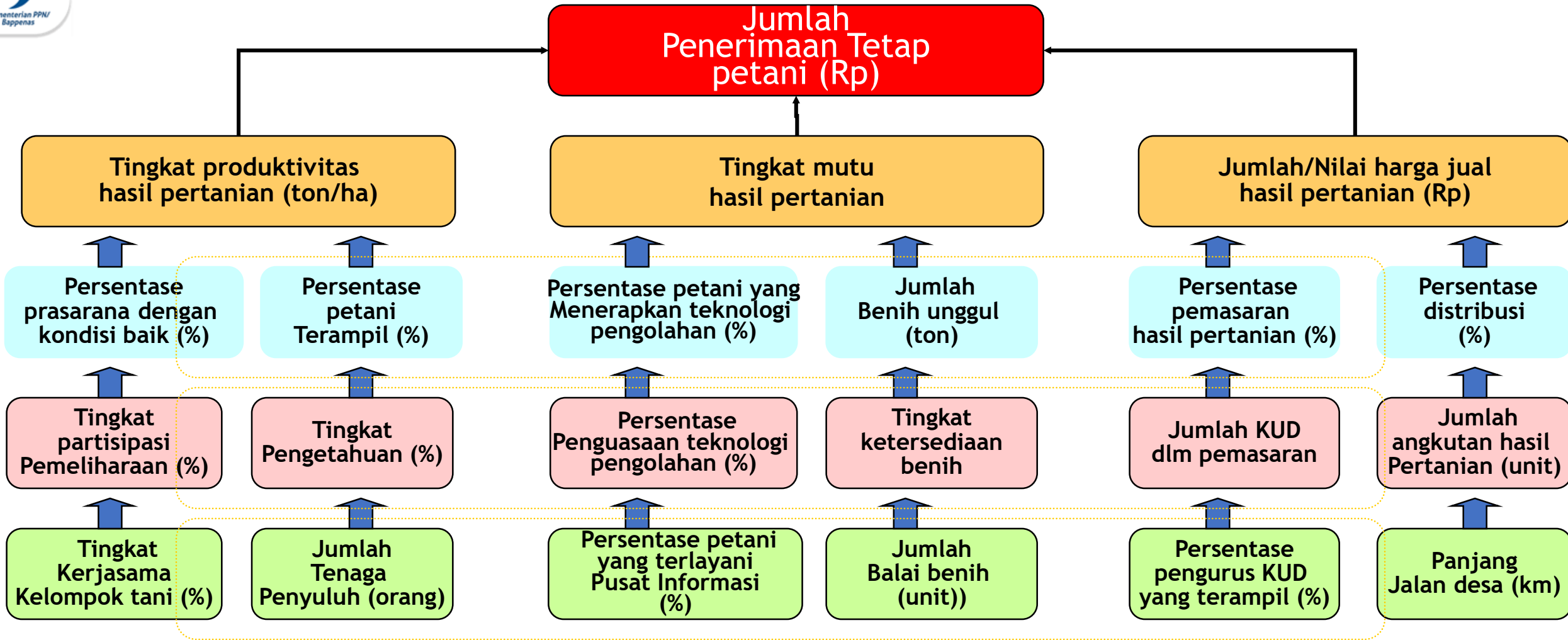
Pohon Masalah Rendahnya Penerimaan Tetap petani



Pohon Tujuan



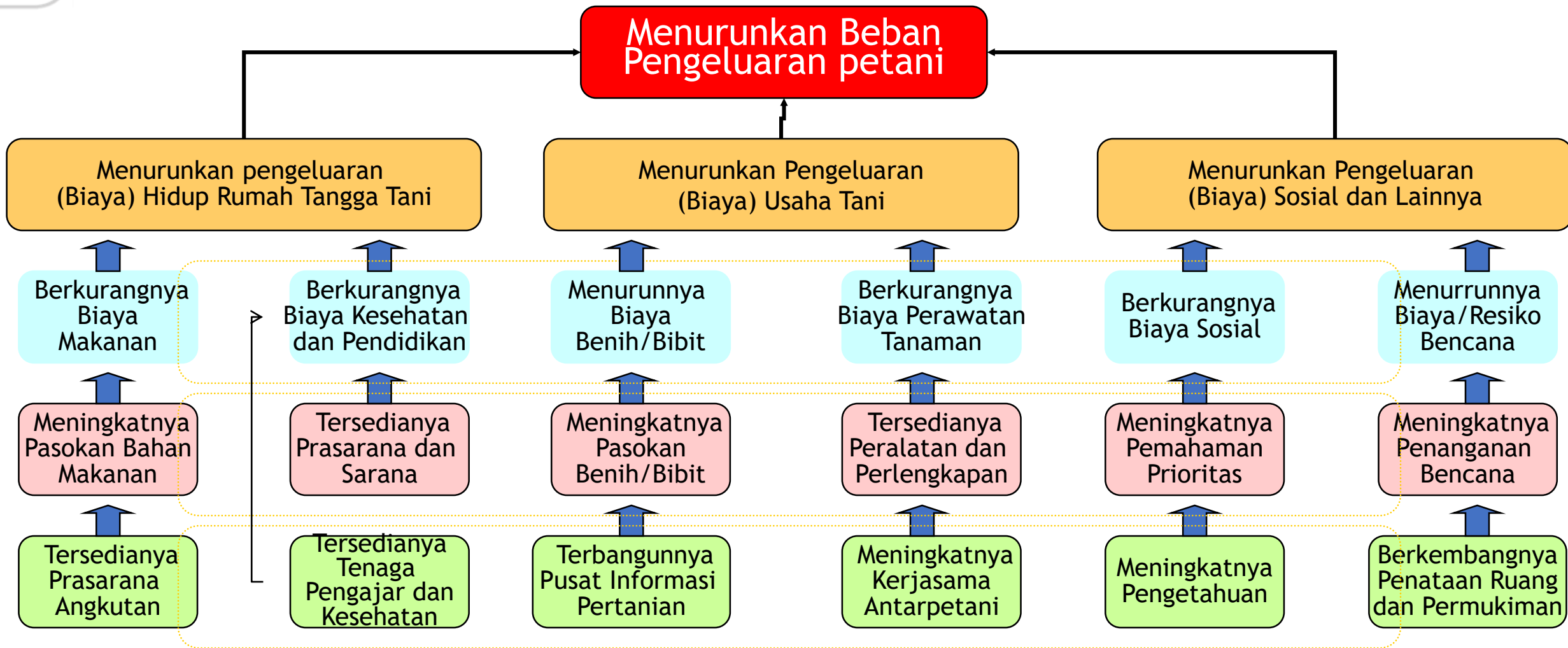
Indikator Kinerja



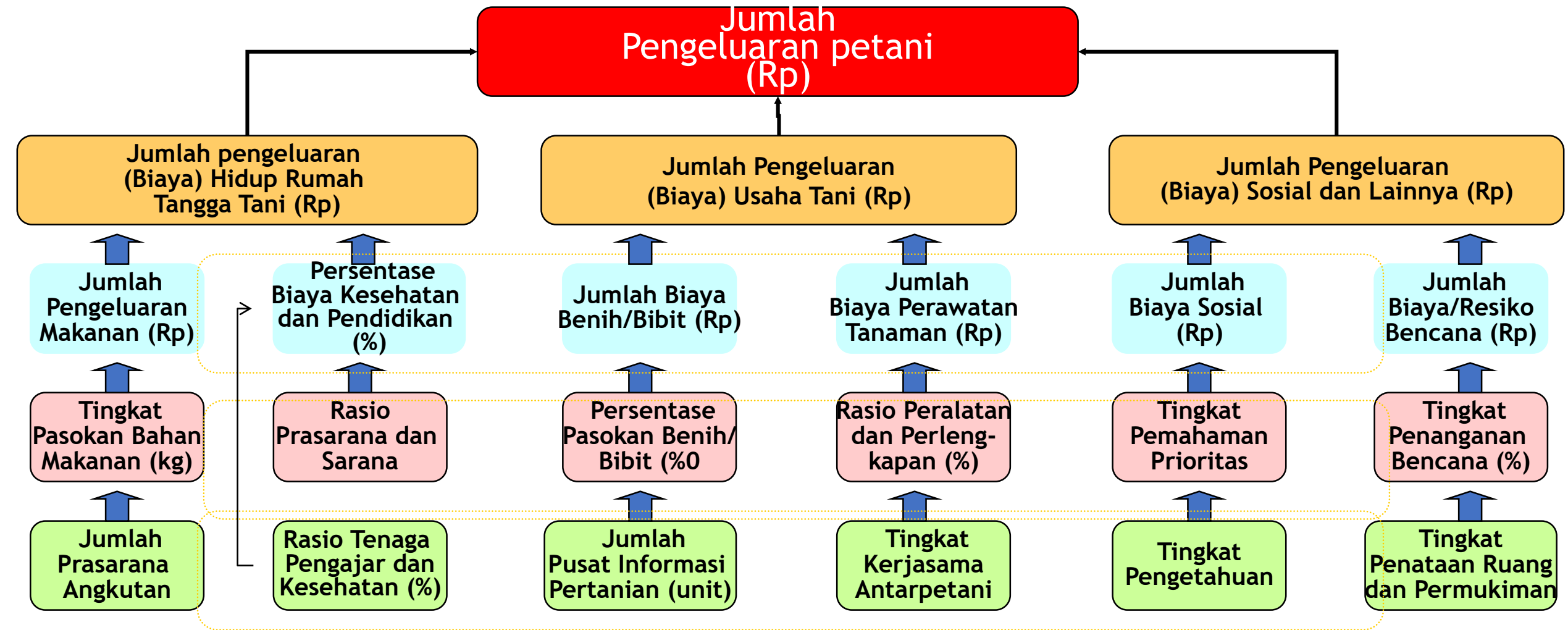
Pohon Masalah Tingginya Beban Pengeluaran petani



Pohon Tujuan Penurunan Pengeluaran petani



Indikator Kinerja Penurunan Beban Pengeluaran Petani





5

SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sinergi dan Konsistensi



Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Audit

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Bappenas
- Kemenko
- K/L
- Kemendagri
- Pemda

1

- Bappenas
- Kemenkeu
- K/L
- Kemenko
- Kemendagri
- DPR dan DPD

2

LKPP

3

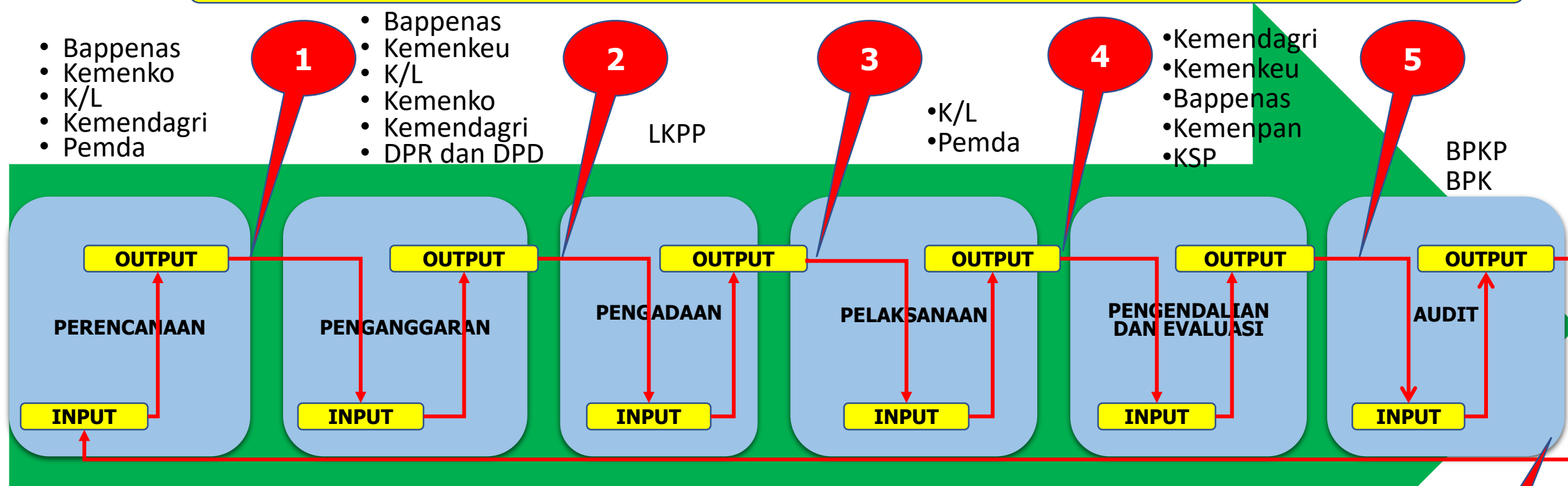
- K/L
- Pemda

4

- Kemendagri
- Kemenkeu
- Bappenas
- Kemenpan
- KSP

5

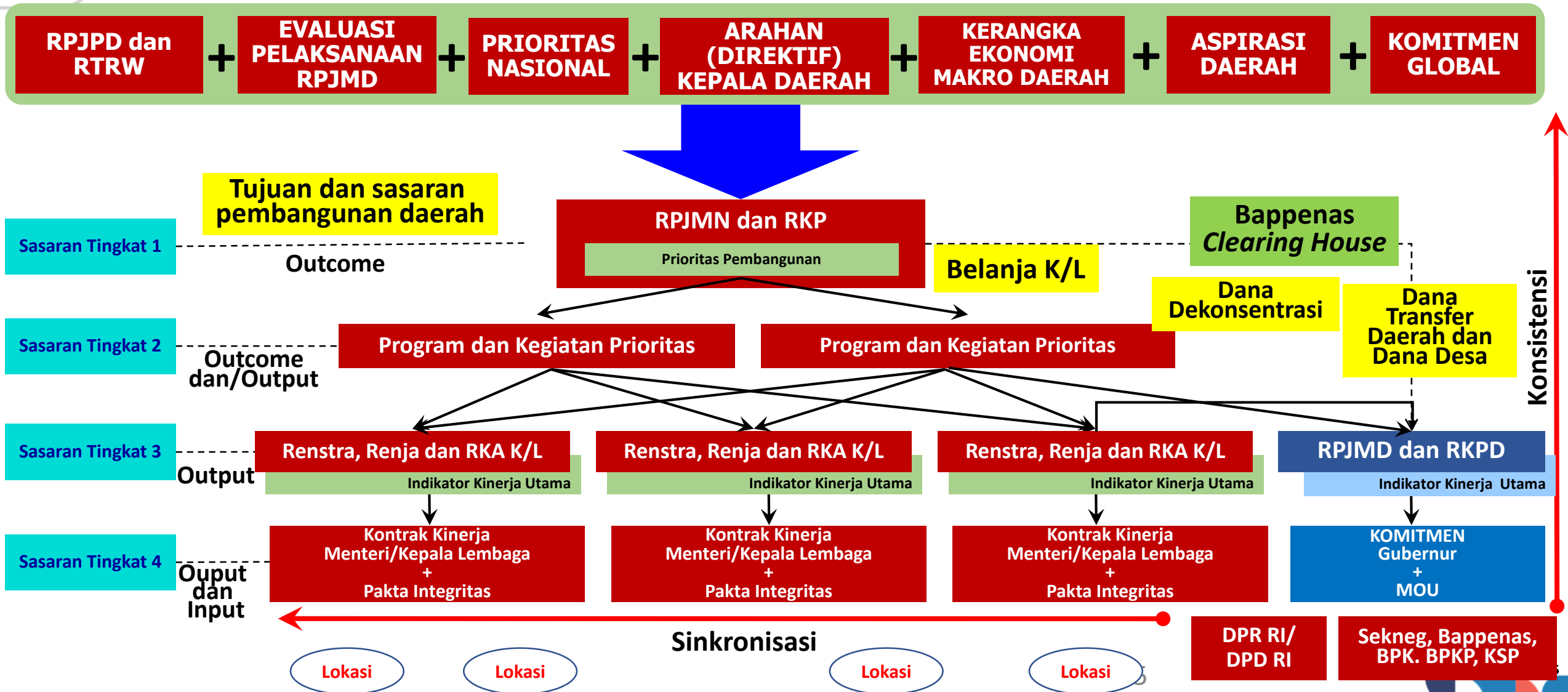
BPKP
BPK



6

1. Keterkaitan #1: RPJM vs Renstra, RKP vs Renja, Renja vs RKA, RKP vs RAPBN, RKPD vs RAPBD, RAPBD vs RAPBN
 2. Keterkaitan #2: Kebutuhan Riil, Standar Biaya dan Standar Harga
 3. Keterkaitan #3: Tertutup vs Terbuka Lelang Manual vs *E-Procurement*
 4. Keterkaitan #4: Kesiapan Perencanaan vs Keterlambatan dan Kapasitas Pelaksanaan
 5. Keterkaitan #5: Pengendalian Parsial vs Terpadu, Internal vs Eksternal (Independen)
 6. Keterkaitan #6: Audit Keuangan vs Audit Kinerja Audit Administrasi vs Audit Subtansi
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE: (*fragmented*) sub sistem vs Terpadu (*integrated*))

Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah



Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Pusat dan Daerah



Sasaran Tingkat 3

Outcome dan/Output

Belanja K/L

Bantuan Dana

Dana Transfer Daerah dan Dana Desa

Sasaran Tingkat 4

Outcome dan/Output



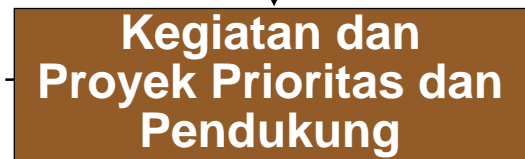
Sasaran Tingkat 5

Outcome dan Output



Sasaran Tingkat 6

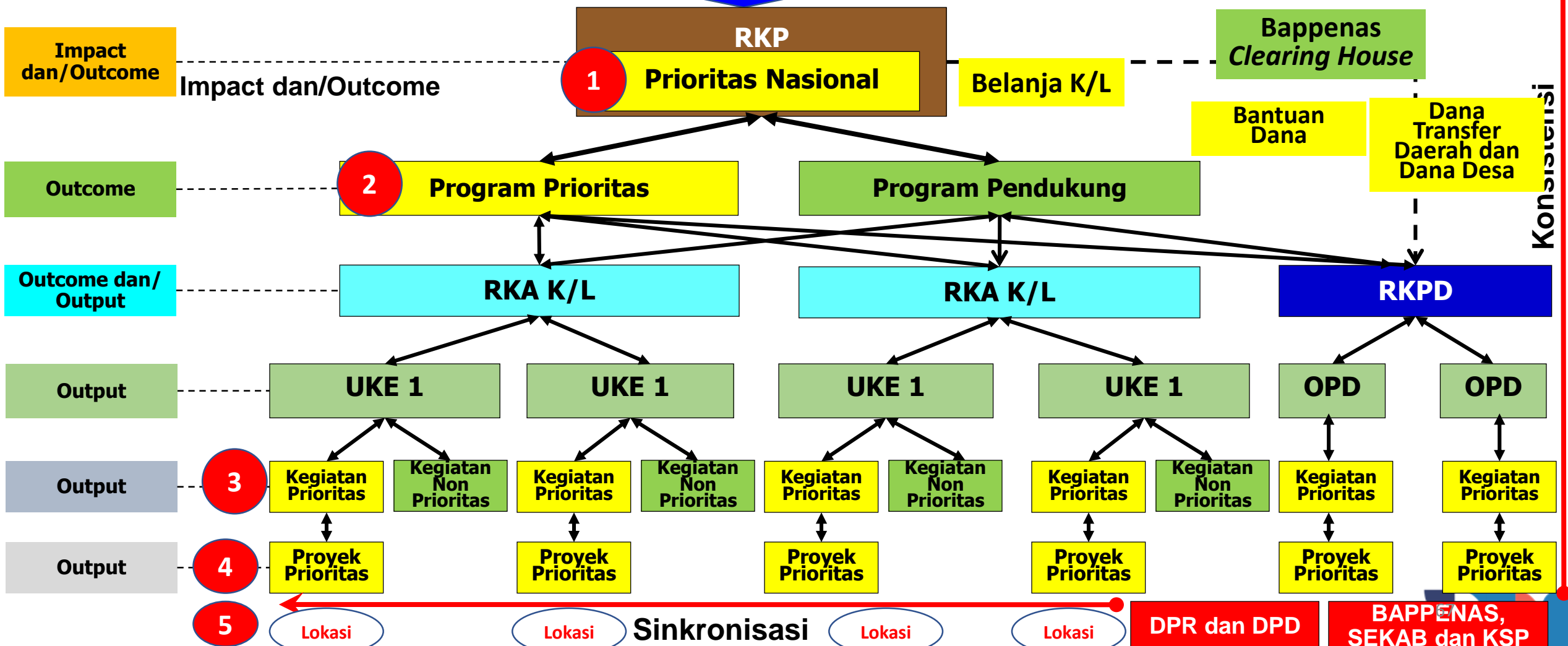
Input dan Output



Sekneg, Bappenas, KSP, DPR/DPD RI

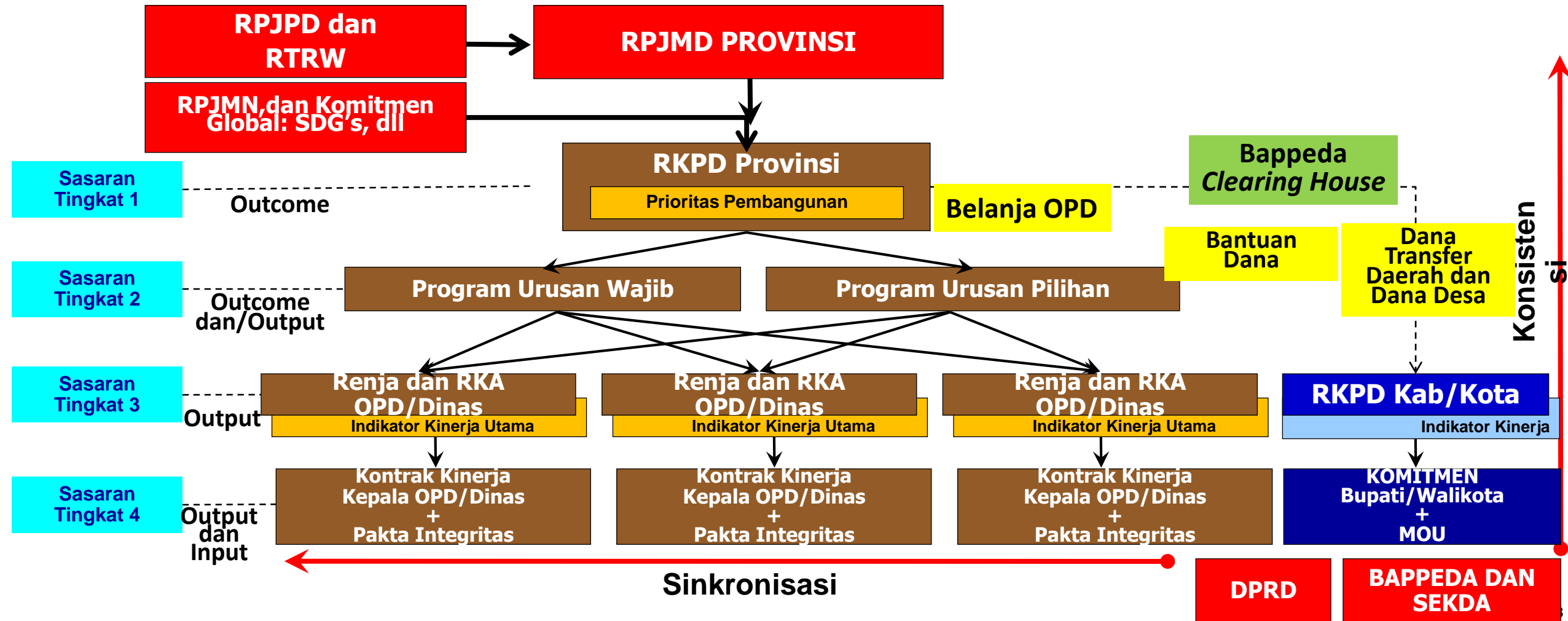
Konsistensi

Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Daerah



Konsistensi

Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota



Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota



Sasaran Tingkat 3



Sasaran Tingkat 4



Sasaran Tingkat 5



Sasaran Tingkat 6



Konsistensi

Sinkronisasi dan Konsistensi Prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota

PRIORITAS NASIONAL

TARGET RPJMD

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

ASPIRASI CAMAT DAN LURAH

KOMITMEN GLOBAL

RKPD

1

Prioritas Daerah

Impact dan/Outcome

Impact dan/Outcome

Belanja OPD

Bappeda
Clearing House

2

Program Prioritas

Program Pendukung

Bantuan Dana

Dana Transfer Daerah dan Dana Desa

Outcome

Outcome dan/Output

RKA OPD/Dinas

RKA OPD/Dinas

RKA Kecamatan

Output

Kabag/Kabid

Kabag/Kabid

Kabag/Kabid

Kabag/Kabid

OPD

OPD

Output

3

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Non Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Non Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Non Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Non Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Output

4

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

5

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Sinkronisasi

DPDR

BAPPEDA, SEKDA dan Inspektorat Daerah

Konsistensi

Identifikasi Fakta dan Analisis Masalah



Desa	Fakta (Data dan Informasi Statistik, dan Pendapat)		Analisis Masalah atau Faktor Penyebab ¹⁾					Jumlah Skala ²⁾	Urutan Prioritas ³⁾	Isu Strategis	
	Potensi	Masalah	SDA	SDM	PRA	MOD	LEM				IPTEK
	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian Pangan: padi dan palawija Perkebunan Karet 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya produktivitas Rendahnya Harga jual Rendahnya pendapatan petani 	1	3	3	4	4				5
<ul style="list-style-type: none"> Pertanian Pangan: padi dan palawija Perkebunan kelapa sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya produktivitas Rendahnya Harga jual Rendahnya pendapatan petani 	1	3	3	4	4	5	30	2	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan petani Pembangunan prasarana Penyediaan modal Pengembangan IPTEK 	
Pertanian pangan: ubi kateu dan ubi jalar	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya produktivitas Rendahnya Harga jual Rendahnya pendapatan petani 	2	3	4	5	4	5	31	1	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan petani Pembangunan prasarana Penyediaan modal Pengembangan IPTEK 	
Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya produktivitas Rendahnya Harga jual Rendahnya pendapatan petani 	1	2	3	4	4	4	24	4	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan petani Pembangunan prasarana Penyediaan modal Pengembangan IPTEK 	
....											

- Identifikasi masalah dan faktor penyebab dilakukan dengan menganalisis ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan Prasarana (PRA), kecukupan Modal (MOD), kesiapan Kelembagaan (LEM) dan kesiapan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- Analisis masalah dilakukan dengan memberikan skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar dan (5) Sangat Besar.



Prioritas Pembangunan dan Sasaran Kinerja Dinas/OPD Kecamatan...



Prioritas Pembangunan	Progam/ Kegiatan	OPD/Dinas	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		2025		2026		2027		2028	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian pangan dan palawija	Peningkatan Produksi Padi • Pengadaan benih • Pengadaan obat-obatan	Dinas Pertanian	Meningkatnya produksi padi sebesar 10%	Jumlah produksi padi	MASUKAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN									
	Penyediaan modal	Dinas Koperasi	Tersedia-nya modal bagi 30 kelompok tani	Jumlah kelompok tani penerima modal	MASUKAN RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM									
	Pembangunan tanggul	Dinas PU	Terbangunnya tanggul 2 km	Panjang tanggul	RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR									
	Pembangun-an jalan Desa	Dinas PU	Terbangunnya jalan desa 6 km	Panjang jalan desa	RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR									
	Peningkatan peran KUD	Dinas Koperasi	Meningkatnya nilai usaha KUD	Jumlah penjualan KUD	RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM									
	Pengolahan hasil pertanian	Dinas Perindustrian	Meningkatnya produ-ksi jagung olahan 10%	Jumlah produksi jagung olahan	RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG									
	Perluasan Pemasaran	Dinas Perda-gangan	Meningkatnya nilai perdagangan 15%	Jumlah penjualan padi olahan	RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG									

Prioritas Pembangunan dan Sasaran Kinerja Dinas/OPD Kabupaten...



Prioritas Pembangunan	Progam/ Kegiatan	OPD/Dinas	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		2025		2026		2027		2028	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian pangan dan palawija	Peningkatan Produksi Padi • Pengadaan benih • Pengadaan obat-obatan	Dinas Pertanian	Meningkatnya produksi padi sebesar 10%	Jumlah produksi padi	MASUKAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN									
	Penyediaan modal	Dinas Koperasi	Tersedia-nya modal bagi 30 kelompok tani	Jumlah kelompok tani penerima modal	MASUKAN RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM									
	Pembangunan tanggul	Dinas PU	Terbangunnya tanggul 2 km	Panjang tanggul	RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR									
	Pembangun-an jalan Desa	Dinas PU	Terbangunnya jalan desa 6 km	Panjang jalan desa	RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM									
	Peningkatan peran KUD	Dinas Koperasi	Meningkatnya nilai usaha KUD	Jumlah penjualan KUD	RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM									
	Pengolahan hasil pertanian	Dinas Perindustrian	Meningkatnya produ-ksi jagung olah-an 10%	Jumlah produksi jagung olah-an	RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG									
	Perluasan Pemasaran	Dinas Perda-gangan	Meningkatnya nilai perdagangan 15%	Jumlah penjualan padi olah-an	RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG									

Rencana Strategis Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur



Prioritas	Kabupaten/ Kota	Progam/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		2025		2026		2027		2028	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian pangan dan palawija		Peningkatan jalan • Pembangunan Jalan desa • Pembangunan jaringan irigasi	Meningkatnya akses prasarana pertanian • Terbangunnya jalan desa 2 km • Terbangunnya jaringan irigasi 300 m	Jumlah prasarana pertanian • Panjang jalan desa • Panjang jaringan irigasi										
		Peningkatan jalan • Pembangunan Jalan desa • Pembangunan jaringan irigasi	Meningkatnya akses prasarana pertanian • Terbangunnya jalan desa 3 km • Terbangunnya jaringan irigasi 400 m	Jumlah prasarana pertanian • Panjang jalan desa • Panjang jaringan irigasi										
		Peningkatan jalan • Pembangunan Jalan desa	Meningkatnya akses prasarana pertanian • Terbangunnya jalan desa 4 km	Jumlah prasarana pertanian • Panjang jalan desa										
		Peningkatan jalan • Pembangunan Jalan desa	Meningkatnya akses prasarana pertanian • Terbangunnya jalan desa 3 km	Jumlah prasarana pertanian • Panjang jalan desa										





6

RENCANA KERJA PEMERINTAH 2023

Prioritas dan Fokus



Identifikasi Isu Strategis dan Prioritas



Isu Global

- Varian COVID-19
- Pasokan Pangan dan Energi
- Inflasi
- Investasi
- Industri dan Pariwisata

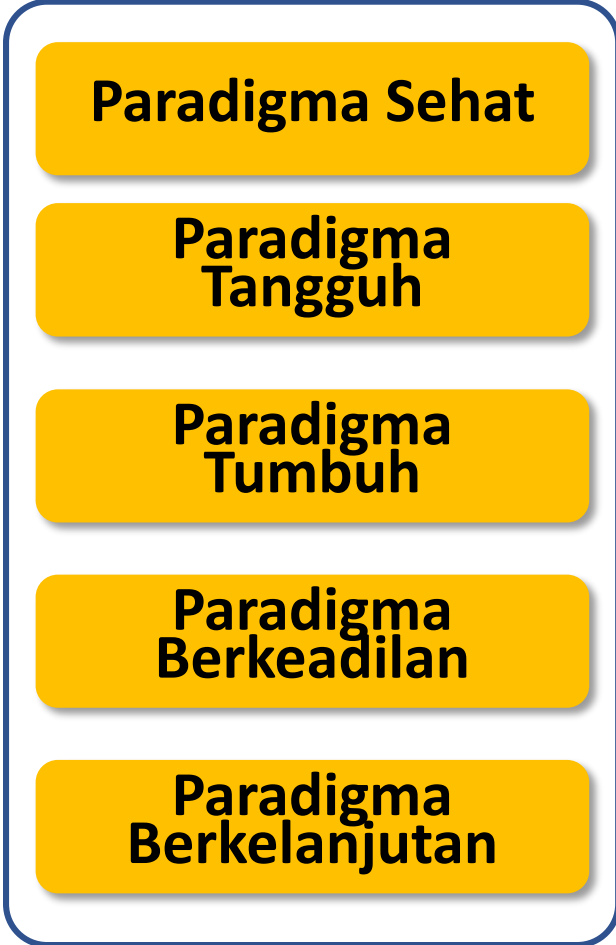
Isu Nasional

- Fiscal Deficit
- Investasi
- Rantai Nilai
- Inflasi dan Daya Beli

Isu Lokal

- Bencana dan Daya dukung Lingkungan
- Pematapan Pemulihan Ekonomi
- Daya beli
- Kemiskinan dan Pengangguran
- Pemerataan

**Kenormalan Baru
(New Normal)**



Strategi dan Arah Kebijakan

Nasional



Provinsi



Kabupaten/Kota



Kecamatan dan Desa

Prioritas Pembangunan

Integrasi Ekonomi Domestik (Major Project, Proyek Strategis Nasional dan PEN)



Pengembangan Kawasan dan Penguatan Rantai Nilai (Value Chain)



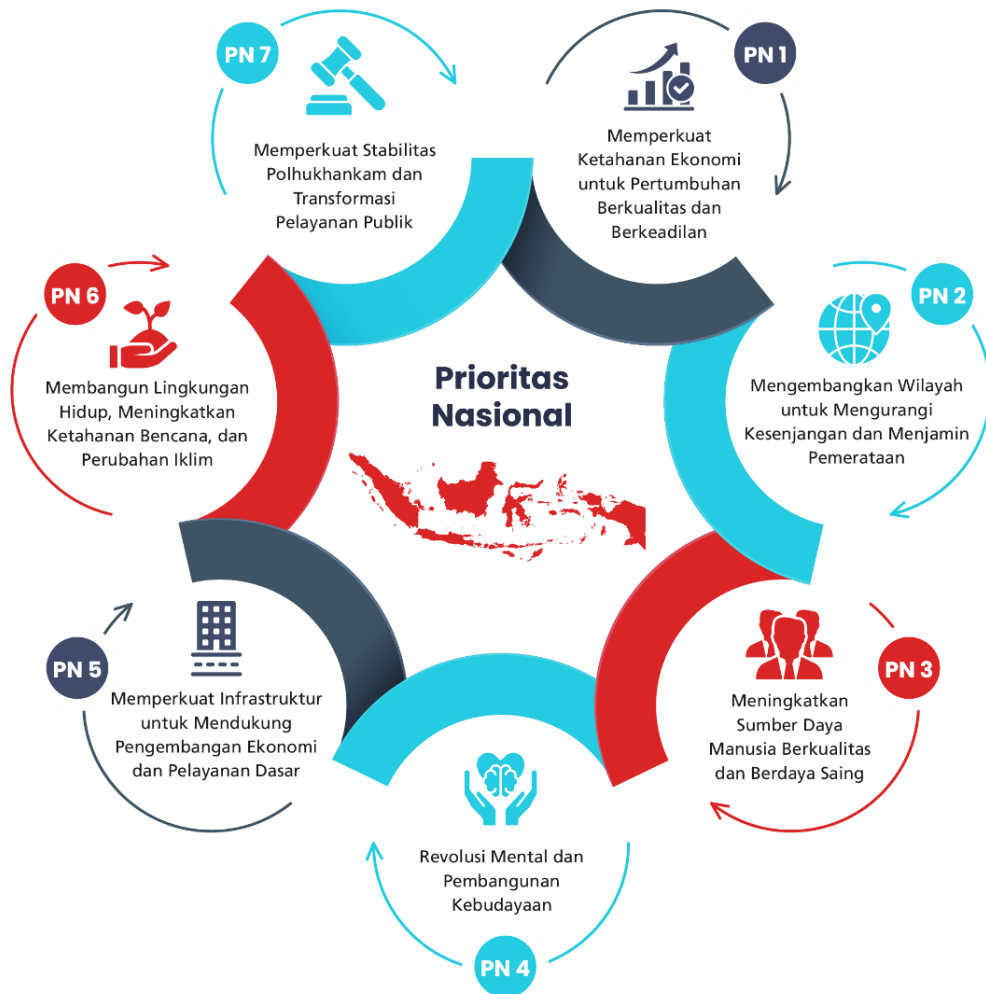
Inovasi Daerah, Upgrading dan Standar Baru Pelayanan Publik dan Daya Saing



Revitalisasi Kecamatan dan Inovasi Desa/Kelurahan



TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2023



Tema RKP Tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

PRODUKTIVITAS

- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- Mendorong pemulihan dunia usaha
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Infrastruktur digital dan konektivitas



INKLUSIF

- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
- Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

BERKELANJUTAN

Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)



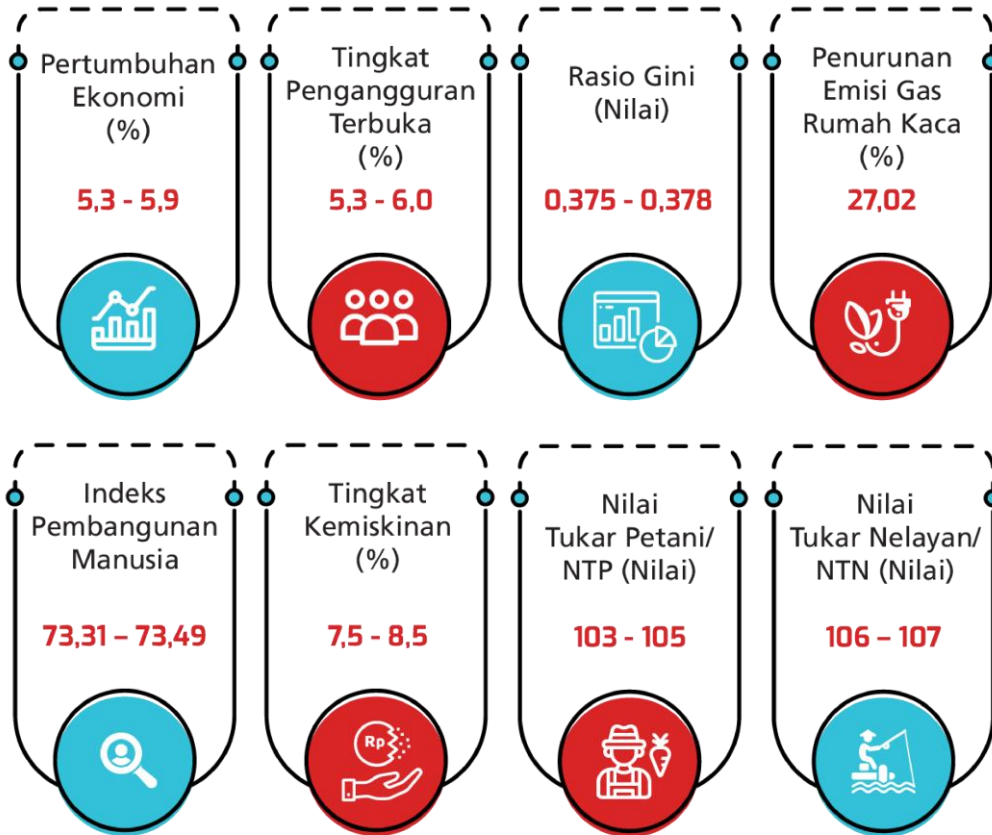
TRANSFORMASI EKONOMI

1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4. Transformasi Digital
5. Integrasi Perekonomian Domestik
6. Pemandangan IKN

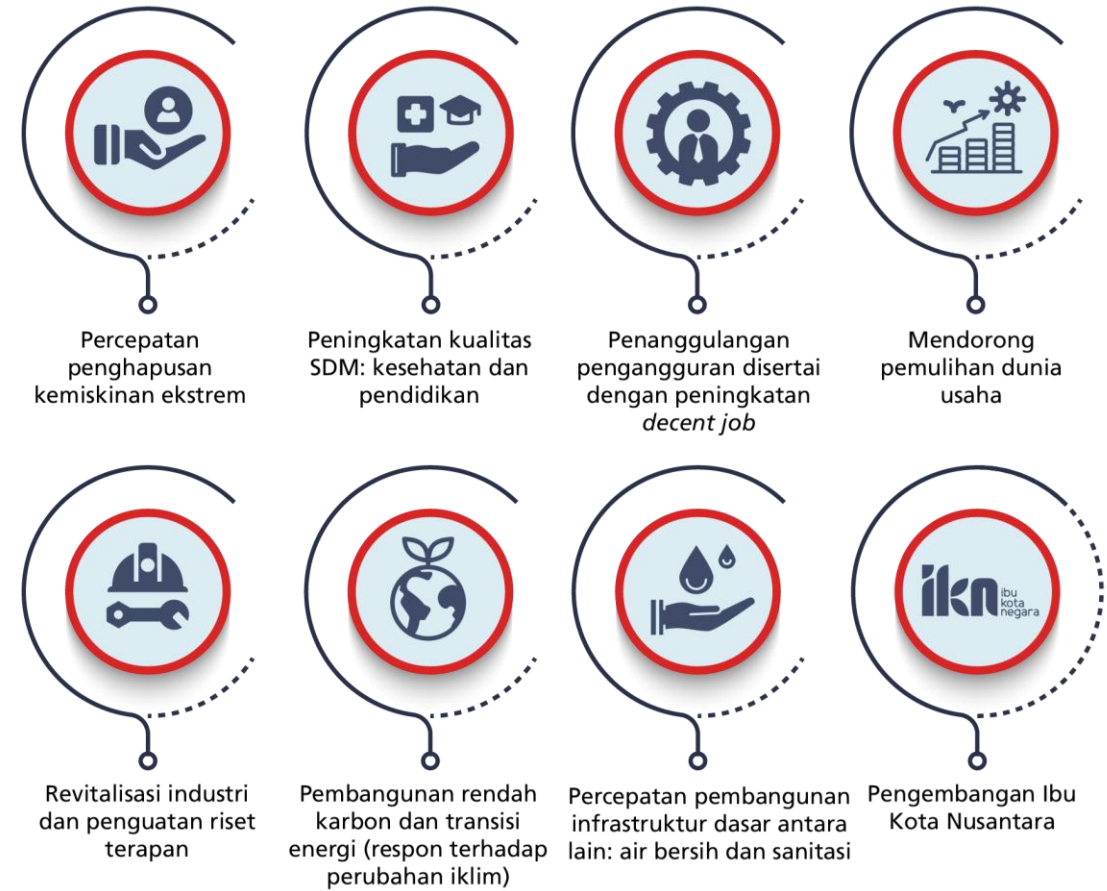
Sasaran dan Arah Kebijakan RKP TAHUN 2023



Sasaran RKP Tahun 2023



Arah Kebijakan



Sasaran Pembangunan Wilayah RKP 2023



Sumatera	
Growth	4,7 - 5,2
Share	21,4
%miskin	8,2 - 8,6
TPT	4,6 - 5,3

RA RKP 2023

Kalimantan	
Growth	5,5 - 6,0
Share	8,3
%miskin	4,3 - 5,1
TPT	4,5 - 5,2

RA RKP 2023

Sulawesi	
Growth	7,1 - 7,8
Share	7,2
%miskin	8,3 - 8,8
TPT	4,2 - 4,8

RA RKP 2023

Maluku	
Growth	9,2 - 10,0
Share	0,7
%miskin	10,6 - 11,4
TPT	5,4 - 5,9

RA RKP 2023

Jawa - Bali	
Growth	5,3 - 5,8
Share	58,8
%miskin	6,9 - 7,6
TPT	6,0 - 6,7

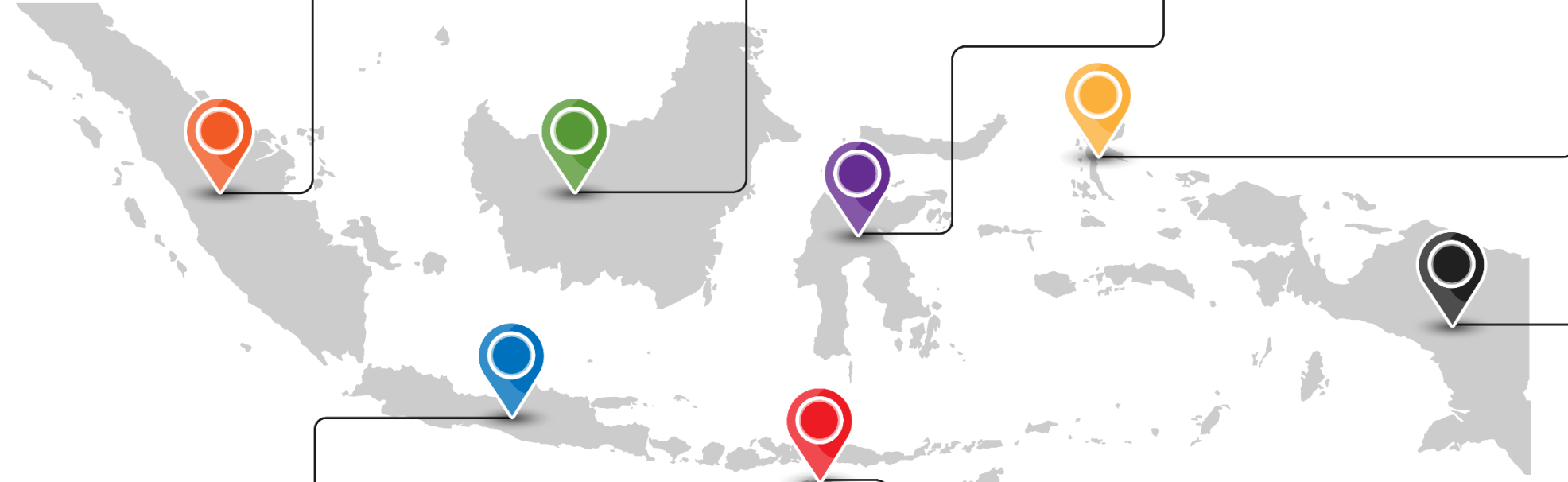
RA RKP 2023

Nusa Tenggara	
Growth	5,1 - 5,7
Share	1,5
%miskin	13,8 - 14,8
TPT	2,7 - 3,1

RA RKP 2023

Papua	
Growth	7,3 - 8,4
Share	2,1
%miskin	22,0 - 23,6
TPT	3,4 - 3,8

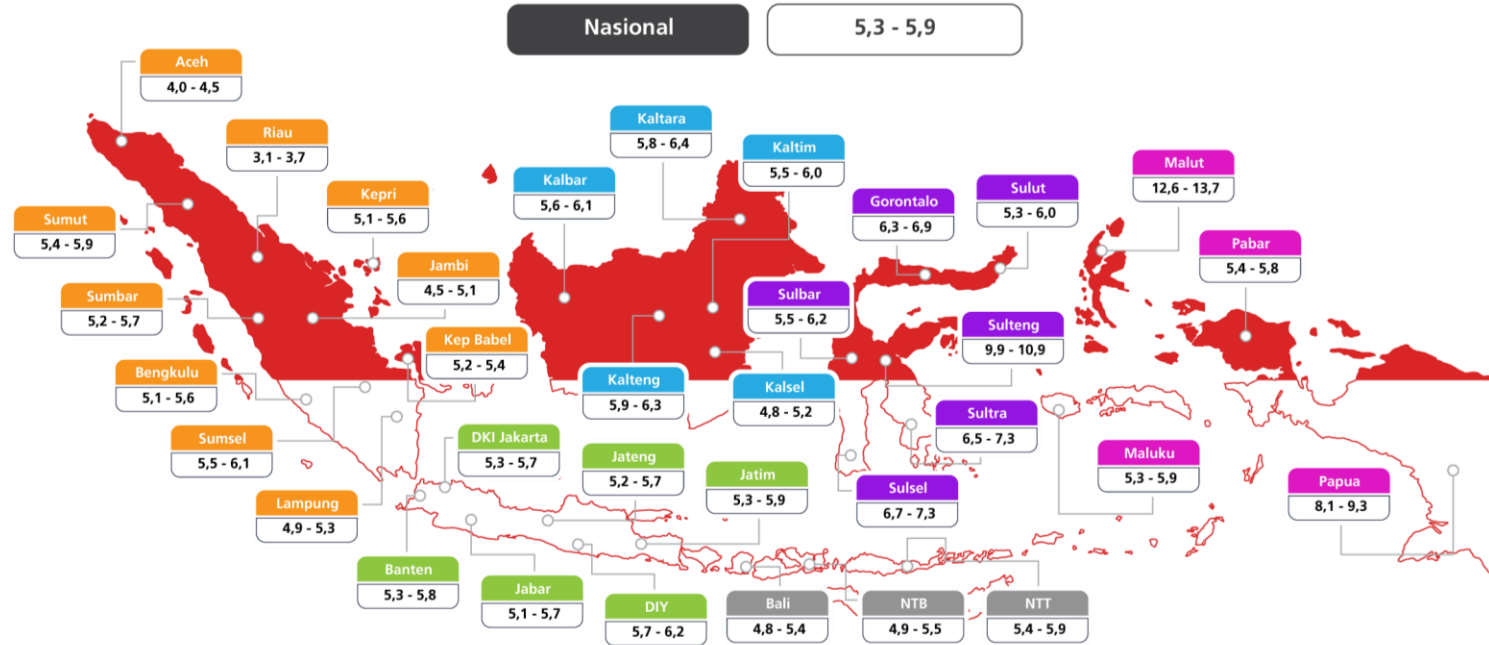
RA RKP 2023



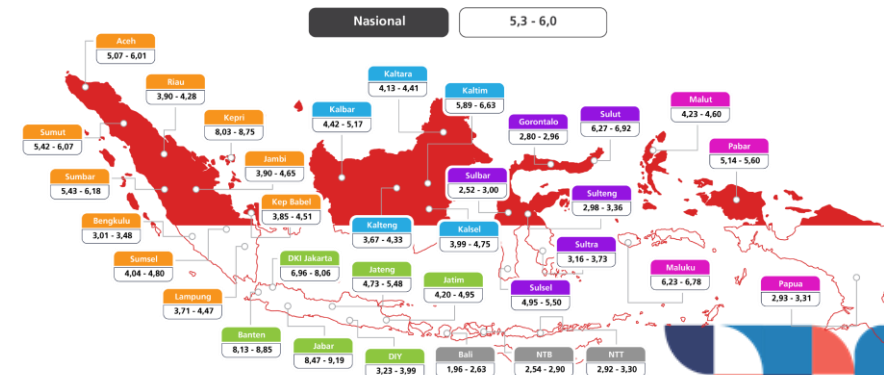
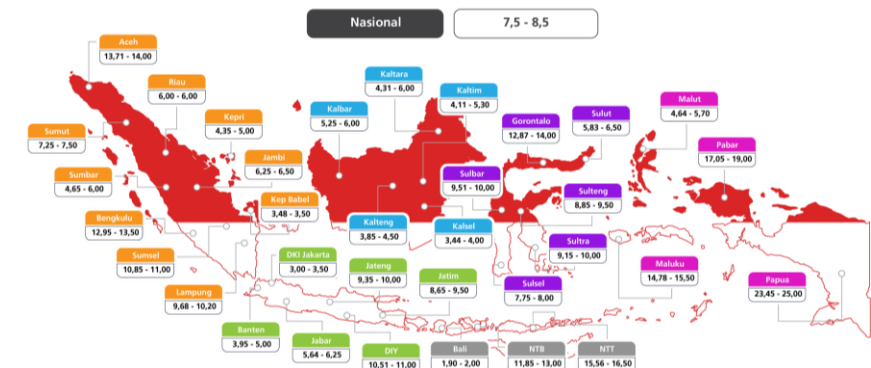
Sasaran Pembangunan Wilayah RKP 2023



Sasaran Pertumbuhan Ekonomi



Sasaran Tingkat Kemiskinan



FOKUS DAN *HIGHLIGHT* MAJOR PROJECT RKP 2023



1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

- Sistem Jaminan Sosial
- Modernisasi Pertanian
- Pemerataan Pembangunan

Dukungan MP:

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
- MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*

- Penyediaan lapangan usaha

Dukungan MP:

- Didukung oleh MP pada Arah Kebijakan 1,2, 4 dan 5

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan

- Industrialisasi
- Riset dan Inovasi

Dukungan MP:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

- Penyediaan air bersih dan sanitasi
- Infrastruktur Digital
- Infrastruktur Konektivitas

Dukungan MP:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- MP Transformasi Digital
- MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting



2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan

- Sistem Kesehatan
- Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)

Dukungan MP:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0)

4. Mendorong pemulihan dunia usaha

- Revitalisasi pariwisata
- Pengembangan UMKM

Dukungan MP:

- MP Destinasi Pariwisata Prioritas
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim

- Ekonomi rendah karbon
- Transisi energi

Dukungan MP:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Proyek Prioritas (Major Projects) 2023



PN 1

1. Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas
2. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
3. Destinasi Pariwisata Prioritas
4. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
5. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
6. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
7. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market bertaraf Internasional
8. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
9. Pengelolaan Terpadu UMKM

PN 2

10. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan
11. Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar
12. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
13. Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong
14. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
15. Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda
16. PKSN Kawasan Perbatasan Negara
17. Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)

PN 3

18. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
19. Pembangunan Science Techno Park
20. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
21. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
22. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

PN 4

Mendukung Pelaksanaan MP di PN Lainnya

PN 5

23. Rumah Susun Perkotaan
24. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
25. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)
26. Pemulihan 4 DAS Kritis
27. 18 Waduk Multiguna
28. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
29. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
30. Kereta Api Makassar-Pare Pare
31. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)
32. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
33. Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
34. Jalan Trans Papua Merauke-Sorong

35. Jembatan Udara 37 Rute di Papua
36. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 WM: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar
37. Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MCA
38. Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
39. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 Km)
40. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
41. Transformasi Digital

PN 6

42. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
43. Penguatan Sistem Peringatan Dini bencana

PN 7

44. Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
45. Penguatan Keamanan Laut di Natuna



Kebijakan Pembangunan Wilayah 2023

Pembangunan kewilayahan diarahkan

Menyelesaikan isu ketimpangan antarwilayah

Dengan sasaran antara lain:

1. meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa);
2. meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah;
4. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”.

Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah

Koridor Pertumbuhan

“memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan”

Koridor Pemerataan

“meningkatkan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas terutama kabupaten/kota dalam koridor pemerataan.”

Target, Major Project dan Proyek Prioritas di 7 wilayah pembangunan



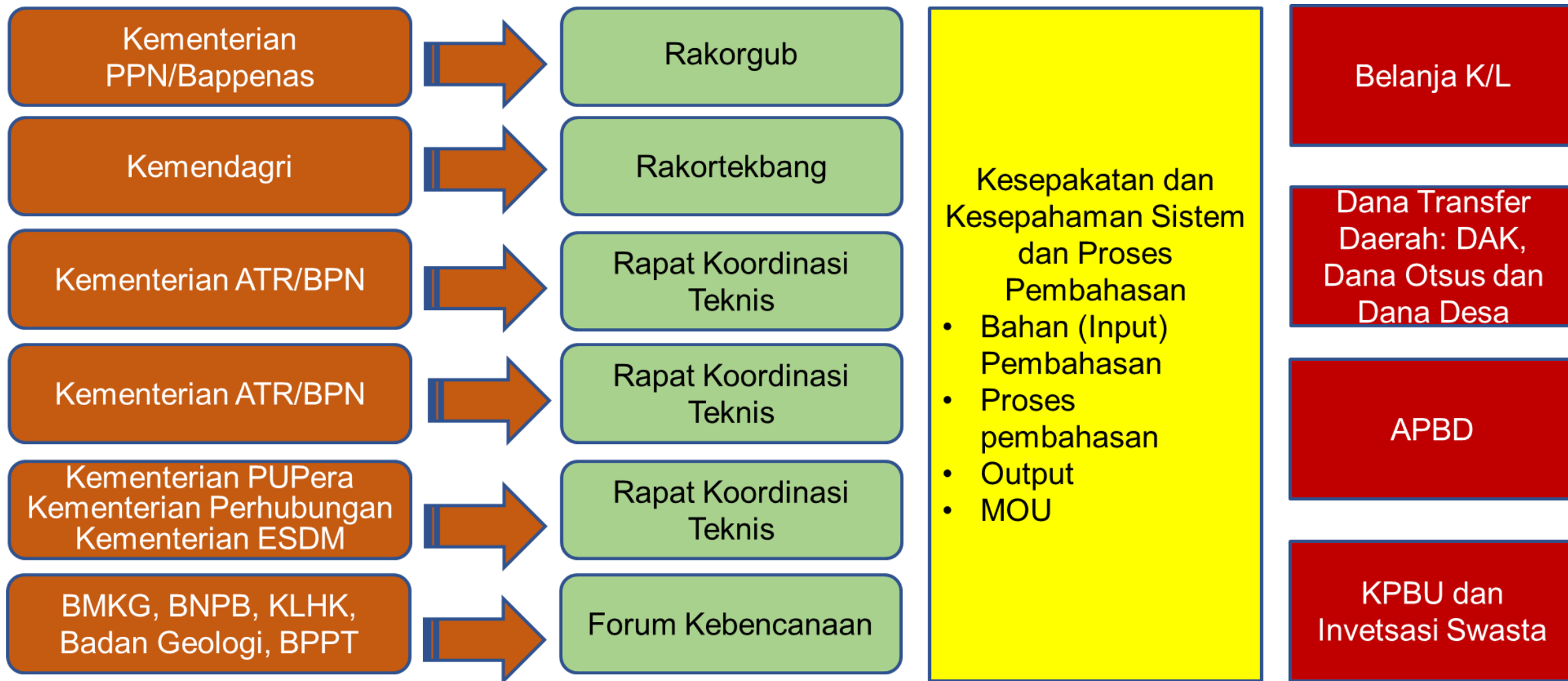
KOLABORASI DAN SINERGI LOKASI PRIORITYAS

Rantai Nilai, Tata Ruang, Lahan, Infrastruktur dan Kewenangan



HARMONISASI FORUM DAN RAPAT KOORDINASI

Forum Perencanaan Rakorteknis, Rakorbang dan Rakorgub





7

PENUTUP

Kerjasama dan Kolaborasi Multipihak



Kerjasama dan Kolaborasi Membangun Keunggulan



KOMPARATIF

Kondisi geografis dan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, aman dan berkelanjutan

Penduduk, angkatan kerja, dan tenaga kerja terdidik, tangguh dan sadar bencana.

Kondisi ketertiban dan keamanan daerah yang stabil dan terjaga dengan baik.



Infrastruktur: jalan, pelabuhan, bandar udara, listrik, air bersih, dan jaringan transportasi yang modern dan tertata, infrastruktur kebencanaan yang siap.



KOMPETITIF



Produksi dan jasa berstandar internasional

Iklm investasi dan iklim usaha yang mendukung

Protokol kesehatan dan kebencanaan yang solid dan konsisten.

Birokrasi daerah yang modern, profesional dan akuntabel

Kebijakan belanja atau investasi pemerintah yang jelas, konsisten, terukur dan berkesinambungan

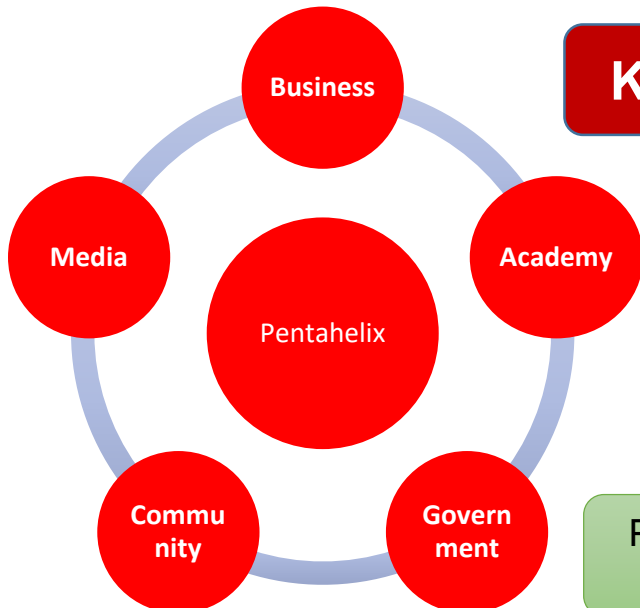


Pelaku bisnis yang bermutu tinggi dengan semangat kewirausahaan, profesional, disiplin dan etos kerja kuat; memiliki kemampuan manajerial dan jaringan luas.

KOLABORATIF

Kerjasama dan kemitraan Pemerintah, Pemda, Pelaku usaha, Perguruan tinggi, Masyarakat dan Media dalam riset dan pengembangan teknologi dan inovasi unggulan

Perluasan Jejaring dan Promosi Riset, Investasi dan perdagangan internasional yang kuat



What next?

Agenda Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Proyek Kerjasama Investasi dan Perdagangan
2. Pengembangan Rantai Nilai Produksi dan Pariwisata
3. Penguatan dan Pengembangan Konektivitas
4. Mitigasi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian

1. Penyiapan Lulusan PT yang unggul, inovatif dan berkualitas
2. Pengembangan Riset Unggulan dan Proyek Unggulan
3. Penguatan Manajemen Pengetahuan
4. Peningkatan Kapasitas Aparat

Kerjasama Pemerintah Daerah, Perbankan dan Swasta

1. Penguatan Kapasitas Manajemen dan Kerjasama UMKM
2. Pembiayaan Investasi Produktif dan Penguatan Rantai Nilai
3. Perluasan Promosi dan Pemasaran
4. Pengembangan Teknologi dan Fasilitas Transformasi Digital

Kerjasama Pemerintah Daerah, Masyarakat Sipil dan Mitra Pembangunan

1. Pengembangan Inovasi
2. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan
3. Pendampingan dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat
4. Proyek Rintisan (*pilot project*)

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Media

1. Pemantauan Kinerja Pembangunan
2. Diseminasi Kebijakan dan Program Pembangunan
3. Literasi, Edukasi dan Budaya Pengetahuan
4. Pengawasan (*Watchdog*) dan Masukan (*Feedback*)

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Luar Negeri

1. Berbagi Informasi dan Pengetahuan (*knowledge sharing*)
2. Alih Teknologi dan Peralatan
3. Perluasan Perdagangan dan Investasi
4. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan



TERIMA KASIH.

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas